

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KALEIDOSKOP 2019

Penghujung tahun jadi momen istimewa untuk kembali berkaca. Atas setiap rekam peristiwa dan jejak upaya, selalu ada pelajaran yang layak untuk dipetik. Pengalaman jadi bekal berharga untuk menyambut masa depan lebih gemilang.



Daftar Isi



Pada edisi kaleidoskop ini, kami merefleksikan peristiwa setahun terakhir. Cermin dipilih untuk menggambarkan proses refleksi dan evaluasi demi perbaikan di masa mendatang. Objek bunga di tengah cermin bermakna isu-isu menarik sepanjang 2019.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

KALEIDOSKOP

- 10 Infografis: Lintas Peristiwa 2019
- 12 Terusik Perkara Plastik
- 18 Agar Ekonomi Syariah Kian Meriah
- 24 Pariwisata Sektor Unggul Penyumbang Ekonomi Bangsa
- 30 Mengejar Kemerdekaan Belajar
- 36 Siasat Dana Siaga Bencana
- 42 Riset Negeri untuk Daya Saing Tinggi

KOLOM EKONOMI

- 49 Di Balik Rasio Pajak
- 51 Tumbuh dalam Tekanan

Lokal

- 54 Sejarah Tak Bersudut di Villa Isola

Renungan

- 56 Mereda dengan Meredam

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufansa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistyio. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediageuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiutnya.

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja

 klc.kemenkeu.go.id

KEMENKEU LEARNING CENTER

Dari Lapangan Banteng

APBN, Instrumen Menjaga Kestabilan Ekonomi

Akhirnya sampailah kita di penghujung tahun 2019. Tahun di mana pesta demokrasi memilih wakil rakyat dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan dan menjadikan ruang publik hiruk pikuk dalam suasana terpecah belah. Beruntung semua berakhir dengan damai dan mulus dengan kembali menetapkan Joko Widodo sebagai presiden ke delapan. Tahun politik 2019 ini juga cukup banyak membawa Kementerian Keuangan ke dalam pusaran berita dan publikasi terutama terkait isu utang negara, pajak, gaji ASN, dan isu lainnya tentang keuangan negara.

Salah satunya terkait tentang dana riset. Kurangnya anggaran negara untuk bidang riset yang dilontarkan oleh salah satu pengusaha besar di bidang *market place*, telah membuat isu ini menggelinding juga ke ranah politik. Tak pelak, isu ini juga berdampak pada bisnis *market place* sang pengusaha tersebut.

Di tahun 2019 ini Presiden Jokowi menetapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk dana riset dan selanjutnya akan membentuk Badan Riset Nasional. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi yang merangkap sebagai Kepala Badan Riset Nasional pada pemerintahan yang baru.

Tax ratio yang selama ini hanya menjadi diskusi ekonomi makro, telah menjadi konsumsi kampanye Pilpres dan menjadi perhatian banyak masyarakat.



Perlu diakui bahwa meningkatnya pendapatan negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia tahun 2018 mencapai sebesar 11,5 persen, yaitu meningkat 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan pertama kalinya setelah rasio pajak menurun terus menerus selama lima tahun terakhir, rasio pajak ini masih kecil bila dibanding negara Asia Pasific lainnya (OECD, 2019).

Tahun 2019 juga diwarnai dengan diperkenalkannya dana untuk penanganan bencana dalam APBN. Selain itu telah dilakukan juga *piloting* untuk memberikan asuransi bagi beberapa gedung dan aset Barang Milik Negara yang dianggap penting di daerah rawan bencana. Dalam APBN 2019 juga telah dikembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko dan skema APBN.

Sementara itu, anggaran pendidikan di tahun 2019 tetap konsisten dengan porsi

20 persen dari total belanja. Fokus belanja pendidikan di tahun 2019 adalah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 agar sehat, cerdas, dan berkarakter. Dana pendidikan melalui beasiswa dan BOS diharapkan dapat mengangkat generasi penerus bangsa untuk membawa dirinya dan keluarga terlepas dari jerat kemiskinan. Program peningkatan kualitas SDM ini akan dilanjutkan juga dalam bentuk program pra kerja di APBN 2020.

Tahun 2019 juga menjadi tahun transisi dari pemerintahan Kabinet Kerja ke Kabinet Indonesia Maju. Beberapa kementerian/lembaga memerlukan waktu untuk dapat merealisasikan anggarannya karena adanya perubahan nomenklatur. Beberapa menteri/pimpinan lembaga juga mengalami pergantian. Namun demikian APBN 2020 tetap harus dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Di tengah kondisi global yang sedang tidak cerah, APBN 2020 harus dapat menjadi alat untuk menjaga kestabilan ekonomi secara nasional. APBN dapat berperan untuk membuat perekonomian negara bertahan dalam guncangan global. Menghadapi tahun 2020, kita tetap optimis namun waspada terhadap perkembangan ekonomi global.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

SIAP MENGABDI UNTUK NEGERI

Dalam acara Orientasi Pegawai Baru CPNS Kemenkeu 2019, terdapat 3.252 orang calon ASN yang merupakan lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Calon ASN yang memiliki rentang usia 17 - 21 tahun ini resmi menjadi penjaga dan pengelola keuangan negara. Mereka akan menjadi bagian dari keluarga besar Kemenkeu yang siap ditempatkan di unit eselon 1 dimana saja penempatannya.

Teks
Resha
Aditya P.

Foto
Irfan Bayu



PERNAK-PERNIK KERAMIK UNIK

Teks
Resha
Aditya P.

Foto
Anas Nur
Huda

Desain, warna, dan corak yang unik menjadikan produk keramik semakin dilirik kalangan masyarakat luas. Semenjak menjamurnya kedai kopi maupun dapur-dapur dengan aksesoris lucu, kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat ini makin digemari oleh banyak orang. Tidaklah heran bila sekarang ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang mulai menekuni bisnis kerajinan keramik untuk dijual baik di dalam maupun luar negeri.





7 Jan — MoU Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS).



20 Feb — Kemenkeu meraih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018



3 Mar — Kemenkeu mengadakan Kompetisi Hackathon 2019 Jakarta, 1-3 Maret 2019



29 Mar — Kemenkeu menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce).



26 Apr — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengenalkan dan meninjau pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Garut



2 Mei — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewakili Indonesia, hadir dalam pertemuan negara-negara anggota program Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) dalam Asian Development Bank Annual Meeting yang ke-52 di Nadi, Fiji.



18 Feb — Menkeu menyatakan apresiasinya terhadap DJBC atas capaian fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).



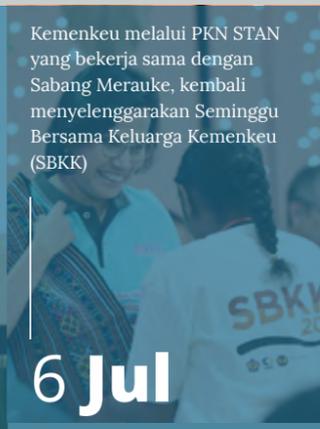
8 Apr — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai The Most Inspiring Woman pada acara Anugerah Indonesia Maju 2018-2019.



12 Jun 2019 — Pemerintah kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018



4 Jul — Menkeu menutup Program Sinergi Reformasi DJP, DJBC, DJA 2019



6 Jul — Kemenkeu melalui PKN STAN yang bekerja sama dengan Sabang Merauke, kembali menyelenggarakan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK)



18 Agus — Menkeu memberikan tantangan kepada anak muda yang hadir maupun menyaksikan acara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Istora Senayan



12 Sep — Menkeu SMI memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berhasil mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan baik lewat BMN Awards.



2 Okt — Menkeu meresmikan museum dan perpustakaan Bea Cukai bernama Loka Wistara



14 Nov — Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)



9 Des — Kemenkeu mendapatkan penghargaan sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2019





Terusik Perkara Plastik

Foto Anas Nur Huda Teks Reni Saptadi D.I

Alam butuh waktu panjang untuk mengurai plastik. Selembar kantong plastik berurai setelah melewati masa puluhan tahun. Akibatnya, bumi terperangkap jerat sampah plastik. Kantong plastik disebut mendominasi populasi sampah plastik. Wacana cukai kantong plastik yang pernah hilang timbul kini kembali dikumandangkan. Akankah menjadi salah satu jalan keluar demi keberlangsungan lingkungan?

Perkara sampah plastik bukan hanya milik negara berkembang. Negara maju turut gundah gulana mengurusinya. Pada 2019, Indonesia telah mengembalikan 13 kontainer yang berisi sampah kertas terkontaminasi plastik serta bahan berbahaya dan beracun kepada Amerika Serikat dan Australia. Peristiwa ekspor kertas bekas yang disusupi sampah plastik oleh negara maju ini menandakan sampah plastik telah menjadi isu global.

Namun demikian, wilayah Asia Timur ditengarai sebagai wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah plastik tercepat di dunia. Penelitian Jenna R. Jambeck pada 2015 menyebutkan, dari 192 negara yang dikaji, sebanyak lima negara di Asia Timur bertanggung jawab atas lebih dari setengah sampah plastik di lautan. Mirisnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok. Total sampah plastik Indonesia yang berakhir ke laut diketahui mencapai 187,2 juta ton.

Tren kenaikan presentasi komposisi sampah plastik di dalam negeri memang nyata terjadi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah nasional mencapai 14 persen pada 2013, lalu meningkat menjadi 16 persen pada 2016.

Hampir seluruh negara di dunia telah melakukan langkah pengendalian penggunaan plastik dengan menerapkan larangan, pembatasan, atau pengenaan cukai. Kini, Indonesia perlu turut bergerak cepat mengendalikan. Menempati urutan kedua terbesar di dunia sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di fase darurat sampah plastik.

Mengendalikan dengan cukai

Telah sekian lama kita terlena oleh kepraktisan kantong plastik. Ia murah dan mudah ditemui. Dengan gampang kita mendapatkannya di segala ragam aktivitas keseharian kita. Ketersediaannya seolah menjadi kebutuhan penting yang sulit tergantikan. Padahal, sering kali ia hanya menjadi barang sekali pakai, yang kemudian berakhir menjadi sampah yang sulit terurai.

Data KLHK pada 2016 menunjukkan sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun. Di sisi lain, para pemulung di berbagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu cenderung mengambil

"Kurang lebih 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun. Hampir 95 persennya menjadi sampah lantaran nilai ekonominya sangat rendah sehingga tidak menjadi pilihan untuk didaur ulang"

HERU PAMBUDI
Dirjen Bea dan Cukai

sampah plastik selain kantong plastik. Tanpa disadari, sampah kantong plastik kian lama kian menumpuk, lalu menjelma sebagai ancaman besar bagi kehidupan.

Oleh karena itu, wacana pengenaan cukai terhadap kantong plastik kemudian dikumandangkan. Cukai kantong plastik diharapkan menjadi pilihan tepat dan moderat. Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengonsultasikannya kepada DPR pada awal Juli 2019.

Dalam paparannya kepada DPR, pemerintah menyebut pengendalian dengan mekanisme cukai lebih tepat. Alasan pertama, sebab besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter barangnya. Kedua, cukai efektif untuk mengendalikan kantong plastik karena pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol fisik atas barang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan penggunaan kantong plastik per menit mencapai lebih dari satu juta lembar. Sekitar 50 persen dari kantong tersebut hanya dipakai sekali, lalu menjadi sampah. Akibatnya, jumlah timbunan sampah kantong plastik terus naik signifikan.

"Kurang lebih 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun. Hampir 95 persennya menjadi sampah lantaran nilai ekonominya sangat rendah sehingga tidak menjadi pilihan untuk didaur ulang," jelas Heru.

Pemungutan di produsen atau importir

Dalam rencana kebijakan yang telah disusun, Heru membeberkan,

pemungutan cukai kantong plastik akan dilakukan di tingkat produsen (industri) atau importir, bukan di tingkat pengecer sebagaimana yang sudah diterapkan dalam kebijakan kantong plastik berbayar. "Hal ini dimaksudkan agar teknis administrasi pemungutan dan pengawasannya relatif lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik ini dapat tercapai secara efektif atau *ease of administration*," terang Heru.

Kemudahan lain dalam rencana kebijakan cukai kantong plastik ialah pembayaran cukai oleh pabrik dapat menggunakan mekanisme pembayaran berkala. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengenaan cukai pada kantong plastik rencananya akan diajukan kepada Presiden segera setelah pokok-pokok kebijakan cukai kantong plastik mendapat persetujuan DPR.

Rencana pengenaan cukai kantong plastik dinilai tepat oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Selain menambah penerimaan negara, cukai tersebut akan menjadi disinsentif penggunaan kantong plastik. Pemerintah dapat mengendalikan sampah kantong plastik di tingkat individual.

"Hal ini cocok pada negara yang memiliki *waste management* yang masih buruk seperti Indonesia. Praktik di berbagai negara memiliki pola demikian. Pengenaan cukai atas plastik diimplementasikan pada negara yang memiliki *waste management* buruk seperti Afrika

Besaran pengenaan tarif cukai kantong plastik per kilogram pada beberapa negara:



Denmark
Rp46.768



Afrika Selatan
Rp41.471



Taiwan
Rp84.239



Irlandia
Rp322.990



Wales
Rp85.534



Malaysia
Rp63.503



Vietnam
Rp24.793



Hongkong
Rp82.942



Inggris
Rp85.534



Kamboja
Rp127.173



Foto
Anas Nur Huda

sehingga dibutuhkan pengendalian di tingkat konsumen,” jelas Yustinus.

Hal penting yang perlu diperhatikan, Yustinus menggarisbawahi, adalah administrasi pemungutan harus efektif. “Penaan cukai atas kantong plastik paling efektif dikenakan di level *supplier* biji plastik atau bahan baku karena akan mencegah perbedaan penaan cukai di pabrikan besar dan kecil,” ujarnya.

Masalah mendasar

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkapkan ada beberapa masalah mendasar dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah dan ketidakpedulian masyarakat Indonesia dengan lingkungan. Selain itu,

tren sampah yang kian meningkat, rendahnya tanggung jawab industri, regulasi, dan impor sampah juga menjadi masalah yang mendasar yang perlu segera dipecahkan.

Novrizal menuturkan, sejak 1974 kewenangan pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat telah didelegasikan kepada daerah. “Pertama kali otonomi itu diberikan salah satunya mengenai pengelolaan sampah,” ujarnya. Sayangnya, menurut Novrizal, berdasarkan Program Adipura yang dilakukan KLHK, diketahui sampah yang tertangani dengan benar baru mencapai 32 persen dari sekitar 415 kabupaten/kota di Indonesia.

“Artinya 28 persen sampah itu langsung dirilis ke lingkungan. Ada yang dibakar, dibuang ke sungai, dan sebagainya,” jelasnya. Sementara itu, lanjutnya, 40 persen sisanya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) secara *open dumping*.

Padahal, pemerintah telah merekomendasikan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggariskan ketentuan ini. Pada tahun pertama sejak aturan tersebut diundangkan, pemda masih diperbolehkan menggunakan sistem *open dumping*. Namun setelahnya, pemda harus melakukan penutupan pada *open dumping* paling lambat lima tahun setelahnya. Itu berarti pada

2013, sistem *sanitary landfill* sudah harus diterapkan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan diakui Novrizal jadi tantangan tersendiri. BPS dalam surveinya merilis Indeks Ketidakpedulian Lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satu yang diukur terkait ketidakpedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari skala 0-1, indeksnya mencapai angka 0,72. “Artinya 72 persen orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah,” sebut Novrizal. Dia meyakini, persoalan edukasi dan kultur yang ada di keluarga dan masyarakat turut memiliki andil.

Pada elemen yang lebih luas, Novrizal menyinggung pentingnya peran industri. Sebagai produsen produk, sudah sepatutnya industri turut ambil bagian dalam mempertanggungjawabkan dampak produk yang telah dihasilkan bagi lingkungan. Ia mengungkapkan, pemerintah tengah memikirkan kemungkinan pemberian insentif bagi industri yang menggunakan barang daur ulang sebagai bahan baku. Melalui insentif ini, industri daur ulang diharapkan bisa memiliki daya tarik lebih, guna bersaing dengan industri luar.

Kedepankan *circular economy*

Minimalisasi penggunaan kantong plastik telah lama diterapkan Joko Tri Haryanto, seorang pemerhati lingkungan sekaligus Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal. Misalnya, tatkala berbelanja di retail modern, jika sedang tidak membawa tas sendiri, ia lebih memilih kardus untuk mewardahi barang yang dibeli.

Joko menyadari sinyalemen bahaya sampah plastik memang nyata, bukan persepsi atau bualan. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berinisiatif untuk membuat regulasi peredaran

kantong plastik di retail modern guna menekan sampah plastik, diantaranya Pemkot Bogor, Denpasar, Samarinda, dan Balikpapan.

Untuk mengatasi persoalan sampah plastik, Joko mengedepankan pentingnya konsep *circular economy*, yakni suatu sistem yang membangun dengan memanfaatkan kembali apa yang telah digunakan di awal. Menurutnya, proses produksi dan konsumsi selalu menimbulkan konsekuensi sampah. Dengan konsep *circular economy*, sampah yang dilahirkan baik oleh produsen dan konsumen akan dipakai lagi dengan memasukkannya ke dalam prosesnya lagi.

Konsep *circular economy* ini sudah berjalan pada proses daur ulang botol plastik yang jamak dilakukan saat ini. Novrizal Tahar turut mengungkapkan hal senada. Menurutnya, terdapat tiga pendekatan besar dalam pengelolaan sampah. Pertama, minim sampah. Kedua, *circular economy*. Dan ketiga, pelayanan dan pendekatan teknologi. “Pada prinsipnya, persoalan sampah bisa diselesaikan tanpa harus mengurangi pertumbuhan industrinya, tetapi bagaimana semaksimal mungkin sampahnya bisa menjadi bahan baku lagi,” jelas Novrizal.

Perubahan perilaku

Joko Tri Haryanto berpendapat penaan cukai kantong plastik merupakan manajemen perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. “Permasalahannya bukan nominalnya, bukan tarifnya, melainkan *magnitude* dari perubahan *behaviour*-nya. Jadi, penaan cukai ini akan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang positif,” tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan Novrizal Tahar yang menegaskan esensi dari penaan cukai plastik bukanlah pada pembedaan tarif. “Sebenarnya yang lebih esensial ialah bagaimana mengurangi sampah plastik itu sendiri,” ujarnya.

Founder Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, turut ambil bagian menyelamatkan lingkungan dari ancaman pencemaran akibat sampah plastik. Menurutnya, kantong plastik adalah pencemar plastik yang paling besar ditemukan di sungai-sungai di kota-kota besar di Indonesia. “Dia juga adalah barang yang tidak esensial. Sehingga kalau kita hilangkan dari kehidupan kita, sebenarnya tidak terlalu masalah,” tuturnya. Tiza mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan produk pengganti kantong plastik. Ia sangat mendorong penggunaan kantong belanja yang dapat dipakai ulang.



Agar Ekonomi Syariah Kian Meriah

Foto Anas Nur Huda Teks Reni Saptadi D.I

Dua dekade terakhir, dunia tengah getol mengembangkan ekonomi syariah. Implementasi pengembangan ekonomi syariah tak didominasi negara muslim saja. Potensi besarnya turut dilirik Tiongkok, Inggris, Luksemburg, Thailand, dan lainnya. Tak mau tertinggal, pemerintah kini kian kuat mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peta jalan telah disiapkan, agar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia segera terwujud.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah dunia salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya populasi muslim. Kenaikan populasi muslim mendorong peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa halal. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 1,84 miliar muslim di muka bumi. Diperkirakan, jumlah ini akan terus beranjak naik dan menyentuh 27,5 persen total populasi dunia pada 2030.

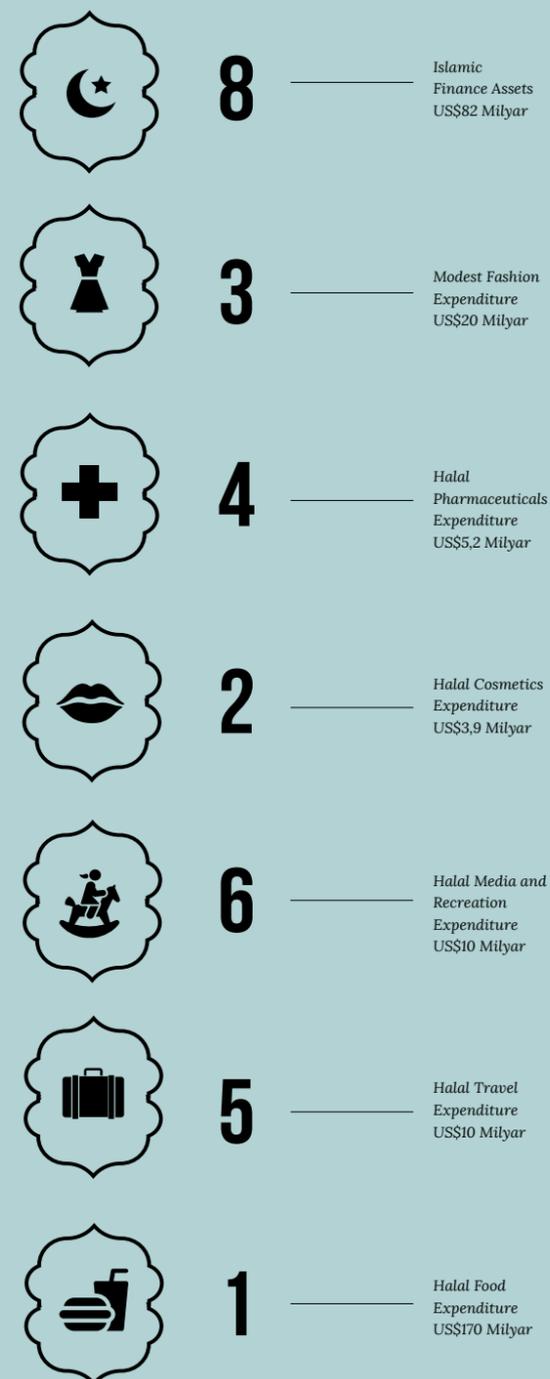
Di tingkat global, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar dan jumlah institusi keuangan syariah tertinggi. *State of The Islamic Economic Report 2018/2019* menyebutkan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 13 persen populasi muslim dunia. Indonesia juga memiliki lebih dari 5000 institusi keuangan syariah. Dengan keunggulan ini, Indonesia berpotensi jadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah dunia. Bahkan, bukan tak mungkin ekonomi syariah Indonesia akan menjadi terbesar di dunia.

Kemajuan ekonomi syariah di Indonesia pelan tapi pasti mulai terasa dan diakui. Pada pertengahan Oktober 2019 lalu, Indonesia mencatatkan skor 81,93 pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019*. Dengan raihan skor tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dalam pengembangan keuangan syariah keuangan global pada *Global Islamic Finance Report (GIFR)* terbaru. Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya lantaran naik lima peringkat dan menggeser Malaysia yang tiga tahun terakhir berada di puncak.

Miliki keunggulan

Islamic Finance Specialist UNDP, Greget Kalla Buana mengamini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang semakin menggembirakan. Meski demikian, dia mengingatkan masih banyak potensi yang

Peringkat Indonesia pada Industri Halal Dunia



bisa digali guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. “Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama *Muslim Food Expenditure* dengan nilai USD170 miliar. Namun, kondisi ini belum mampu menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh besar *halal food*,” ungkapnya.

Greget turut menggarisbawahi sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia. Pertama, adanya sistem kelembagaan yang kuat dalam mendukung ekonomi syariah. “Selain Dewan Syariah Nasional MUI, perkembangan kelembagaan ekonomi syariah juga diperkuat dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang melahirkan Masterplan Ekonomi Syariah,” ungkapnya.

Kedua, adanya hukum dan peraturan yang mengakomodasi inovasi dan kebijakan keuangan syariah di Indonesia. “Sebagai contoh, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (yang) mungkin di negara lain tidak ada,” katanya.

Ketiga, besarnya dorongan masyarakat luas melalui kelompok-kelompok penggerak ekonomi syariah yang mewakili berbagai elemen masyarakat yang memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah. “Sebut saja, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan sebagainya,” rincinya kepada Media Keuangan.

Tumbuh menjanjikan

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia telah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Bank Muamalat menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksinya. Kehadiran Bank Muamalat ini disambut baik oleh penduduk muslim Indonesia, sehingga pada

perkembangannya, berjamur beragam lembaga keuangan lainnya.

Menjelang tiga dasawarsa sejak awal perkembangannya, Indonesia diyakini mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2024 mendatang. Untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016. Lembaga ini telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 sebagai peta jalan yang akan menjadi rujukan bersama guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

KNKS menyadari Indonesia belum mengoptimalkan perannya dalam memenuhi permintaan produk dan jasa halal. Selama ini, Indonesia masih lebih banyak berperan dari sisi *demand* dibanding *supply*. KNKS menyisir sejumlah tantangan yang dihadapi. Tiga diantaranya yakni regulasi industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, dan *interlinkage* industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Peta jalan yang telah disusun akan menjawab tantangan tersebut.

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, implementasi pengembangan ekonomi syariah difokuskan pada sektor riil, utamanya yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah secara khusus memilih sektor produksi dan jasa, terutama yang telah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain.

Menurut Greget, ambisi Indonesia untuk menjadi *Global Halal Hub* bisa dimulai dari prosedur sertifikasi halal yang saat ini telah menjadi acuan dunia. “Terbukti dengan sejumlah negara yang meminta untuk disertifikasi halal oleh MUI atau mengadopsi sertifikasi halal Indonesia,” katanya. Dengan adanya kepercayaan dunia internasional terkait

sertifikasi halal, maka Indonesia bisa memainkan peran sebagai *role model* industri halal.

Greget juga menekankan agar ekonomi syariah tidak dipandang sebagai satu industri terpisah, melainkan terhubung dengan ekosistem dan aspek kehidupan lain secara keseluruhan. Beberapa aspek penting yang dia soroti antara lain nilai-nilai etis, tata kelola dan regulasi, sumber daya manusia (SDM), *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta teknologi.

Tak terpisahkan

Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa sistem ekonomi syariah pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, *Islamic Economic System* merupakan alternatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif, namun juga berkelanjutan.

“Dunia butuh alternatif (sistem ekonomi). Islam tampil dengan *Islamic Economic System*, dengan *Professional Banking System*, dengan *Insurance Banking Assistance*-nya. Dengan begitu, kita sebagai muslim dan bangsa Indonesia bisa tampil dengan Ekonomi Pancasilanya,” jelasnya.

Di sisi lain, Yani Farida Aryani, Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah Badan Kebijakan Fiskal, menjelaskan bahwa keuangan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia sendiri terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, Sukuk Negara dan saham syariah. Selain itu, masih ada pula sektor keuangan sosial islam (*Islamic social finance*) seperti zakat dan wakaf.

“Zakat dan wakaf yang notabene masuk ke dalam kelompok dana sosial

keagamaan itu masuk ke dalam industri keuangan syariah. Seperti Dana Haji juga kan sebetulnya masih ada di dalam ekosistem keuangan syariah,” jelas Yani.

Lebih lanjut, Yani mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah saat ini masih didominasi oleh perbankan syariah dengan total aset per Januari 2019 mencapai Rp479,17 triliun atau sekitar 5,95 persen dari Rp 8.049 triliun total perbankan nasional. Sedangkan untuk industri keuangan nonbank syariah (IKNB) periode yang sama, asetnya tercatat Rp101,197 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,81 persen dari total aset IKNB nasional yang mencapai Rp1.741 triliun. Dari sisi pembiayaan syariah, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sendiri menyumbang 18 persen dari total obligasi negara yang telah diterbitkan sebesar Rp682 triliun per Maret 2019 lalu.

Senada dengan Yani, Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Lokot Zein Nasution, memaparkan bahwa perkembangan instrumen keuangan syariah paling pesat dialami oleh Sukuk Negara. Sementara itu, instrumen keuangan syariah yang lain tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, komposisi dari perbankan syariah terus mengalami penurunan, meski penurunannya tidak menunjukkan gejala yang konsisten, sehingga sifatnya lebih reaktif terhadap kondisi ekonomi global.

“Dari total aset keuangan syariah, dominasi paling besar dimiliki oleh perbankan syariah, kedua adalah sukuk negara, ketiga adalah pembiayaan syariah, keempat adalah asuransi syariah, kelima adalah IKNB syariah, keenam adalah reksadana syariah, dan terakhir adalah sukuk korporasi,” ujarnya.

Peran APBN

Kementerian Keuangan sendiri memiliki peran mendorong keuangan syariah melalui instrumen APBN. Yang pertama adalah dari sisi penerimaan negara. Menurut Yani, kebijakan perpajakan yang kondusif dan mendukung pengembangan keuangan syariah diperlukan dalam bentuk *tax neutrality* dan insentif perpajakan. *Tax neutrality* menjadi penting karena dalam skema keuangan syariah, seperti Sukuk Negara, diperlukan *underlying asset* dalam bentuk barang, manfaat aset, ataupun dalam bentuk proyek.

“Kalau dalam perpajakan, seolah ada penyerahan barang. Jadi, seolah-olah ada dua kali kena PPN. Kalau di Undang-Undang PPN sepanjang ada pertambahan nilai dan sepanjang ada penyerahan akan terkena PPN. Kalau kita bilang ini tidak ada penambahan nilai dan tidak ada penyerahan juga. Karena *underlying asset* tadi hanya sebagai dasar perhitungan untuk memberikan pinjaman,” jelas Yani.

Yang kedua adalah dari sisi belanja APBN. Belanja pemerintah di Kementerian/Lembaga tertentu dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan industri atau ekonomi syariah. Misalnya saja *Halal Tourism* melalui Kementerian Pariwisata

"Zakat dan wakaf yang notabene masuk ke dalam kelompok dana sosial keagamaan itu masuk ke dalam industri keuangan syariah. Seperti Dana Haji juga kan sebetulnya masih ada di dalam ekosistem keuangan syariah".

Yani Farida A
Kepala Bidang
Kebijakan
Pengembangan
Industri Keuangan
Syariah BKF



Foto
Anas Nur Huda

dan Ekonomi Kreatif atau kurikulum pendidikan syariah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terakhir dari sisi pembiayaan. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dwi Irianti Hadiningdyah, memaparkan kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional juga menandai eksistensi serta mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. Bahkan, pada tahun 2018 Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* yang diterima dengan baik oleh investor dan mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga internasional.

Lebih jauh, Dwi menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong ekonomi syariah secara inklusif, di antaranya melalui diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dengan menerbitkan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Melalui instrumen ini masyarakat umum dapat berinvestasi sekaligus berperan serta dalam pembangunan Indonesia.

Kehadiran Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan menambah portofolio investasi bagi investor, terutama investor syariah. Pada tahun 2019, kedua instrumen tersebut diterbitkan dengan minimum Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Hal tersebut dilakukan agar instrumen tersebut dapat dijangkau dan diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Penerbitan SBSN Ritel dilaksanakan setiap tahun dan sangat diminati oleh masyarakat yang terlihat dari pemesanan yang selalu *oversubscribe* sehingga diharapkan melalui instrumen ini dapat mendorong transformasi masyarakat dari *savings-oriented society* menuju *investment-oriented society*,” pungkasnya.



Pariwisata Sektor Unggul Penyumbang Ekonomi Bangsa

Foto Marischa Prudence Teks Dara Haspramudilla

Tahun 2019 merupakan tahun di mana pariwisata Indonesia merona. Indeks daya saing pariwisata Indonesia terus naik hingga menduduki posisi ke-40 pada tahun 2019 berdasarkan laporan yang dirilis World Economic Forum (WEF) '*The Travel & Tourism Competitiveness Report*'.

Pencapaian tersebut diraih bukan tanpa upaya. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penentu kejayaan pariwisata Indonesia. Segenap komitmen dipegang teguh dan ragam ikhtiar dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo demi melecut pariwisata sebagai sektor unggul penyumbang ekonomi bangsa.

Dalam lima tahun terakhir, tren pariwisata telah mengalami sejumlah transformasi. Era digital telah mengubah pengalaman perjalanan wisatawan. Seiring meningkatnya penggunaan gawai dan penetrasi internet di Indonesia, wisatawan semakin mudah untuk merencanakan perjalanan wisata. Kemajuan teknologi juga mengubah pola konsumsi masyarakat. Beragam aplikasi sosial media yang tercipta mendorong individu untuk memamerkan pengalaman perjalanan wisatanya.

Saat ini, perjalanan wisata tidak lagi menjadi kebutuhan tersier melainkan sudah bergeser menjadi primer. Bahkan, memiliki pengalaman perjalanan wisata menjadi lebih penting dibandingkan membeli atau mengonsumsi barang. Kemudian muncul istilah baru yakni *Leisure Economy* yang dipopulerkan oleh Linda Nazareth dalam bukunya “*The Leisure Economy: How Changing Demographics, Economics, and Generational Attitudes Will Reshape Our Lives and Our Industries*”.

Menurut Linda saat ini terjadi pergeseran pola konsumsi dari konsumsi berbasis barang ke konsumsi berbasis pengalaman. Mayoritas masyarakat saat ini lebih memprioritaskan waktu luang daripada barang. *Leisure Economy* dapat disimpulkan sebagai aktivitas yang mengutamakan kepuasan dan kesenangan yang kemudian menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Indonesia, sebagai negara dengan beragam destinasi yang kaya dari segi alam maupun budaya pun tidak lengah memanfaatkan momentum ini. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor utama yang mendorong perekonomian nasional. Bahkan, pariwisata diproyeksikan sebagai penghasil devisa nomor wahid di tanah air.

Fokus pariwisata bukan ambisi belaka

Upaya mendorong industri pariwisata Indonesia tidak hanya sekedar tren semata. Pariwisata Indonesia memang terbukti memiliki potensi besar untuk mendongkrak devisa. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai contoh, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di tahun 2015 adalah sebesar 256,42 dan 10,41 juta. Sementara itu, di tahun 2018 jumlah tersebut naik menjadi 303,5 juta dan 15,81 juta. Tidak hanya itu, sejak 2015 kontribusi industri pariwisata terhadap devisa terus meningkat. Bahkan, pada 2018 pariwisata menyumbang devisa sebesar USD19,2 miliar, mengalahkan sektor minyak dan gas yang selama ini menjadi

primadona.

Dibandingkan industri lain, pariwisata disebut Moekti Prasetyani Soejachmoen, Chief Economist PT Dana Reksa sebagai industri yang paling mudah untuk “dijual” sebab Indonesia sudah memiliki modal yang besar. “Kekayaan alam sudah ada di situ, tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat mengoptimalkan keberadaan dari situs pariwisata itu agar menarik,” tuturnya.

Namun demikian, kesenjangan pariwisata masih menjadi salah satu masalah. Bali adalah nama kota yang terpatri dalam benak wisatawan sebagai tujuan wisata di Indonesia meski Indonesia memiliki banyak destinasi wisata lain. Untuk itulah, Pemerintah mengeluarkan jurus baru yakni ‘Program Sepuluh Destinasi Wisata Prioritas’. Program yang kemudian mengerucut pada ‘Lima Destinasi Super Prioritas’ ini bertujuan untuk mendongkrak pemerataan pariwisata Indonesia dan menciptakan lapangan kerja.

“Dengan adanya sepuluh Bali Baru dan dikerucutkan pada lima Destinasi Super Prioritas tentunya merupakan peluang untuk menarik wisatawan asing dalam menentukan destinasi wisata di Indonesia,” ujar Sufintri Rahayu, Direktur PR Traveloka.

Komitmen pemerintah untuk pariwisata

Anggaran sebesar Rp9,4 triliun dialokasikan Pemerintah di tahun 2020 untuk memoles pariwisata Indonesia di lima destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Anggaran ini meningkat enam kali lipat dari anggaran di tahun 2019 yang hanya sebesar Rp1,69 triliun.

“Secara umum alokasi tersebut untuk



Foto
Faiz

pembangunan fisik maupun nonfisik. Untuk pembangunan nonfisik bagaimana membangun *brand* Indonesia sebagai impian destinasi wisata. Sedangkan pembangunan fisik terutama untuk infrastruktur yang menunjang amenities dan aksesibilitas menuju kawasan wisata,” terang Made Arya Wijaya, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran.

Dari dana tersebut, Kementerian Pariwisata mengalokasikan Rp4.477 miliar antara lain untuk kegiatan promosi (*branding, advertising* dan *selling*), pengembangan destinasi yang memenuhi unsur 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenities), pengembangan destinasi dan kelembagaan, pendidikan kepariwisataan dan pengembangan Kawasan Otorita Pariwisata (Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo).

Sementara itu, dukungan fisik dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dengan membangun berbagai infrastruktur

pengembangan kawasan wisata di lima destinasi super prioritas tersebut. Alokasi anggaran sebesar Rp7.268,9 miliar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sumber daya air, pembangunan rumah swadaya pariwisata, dan penataan pemukiman.

Dukungan aksesibilitas juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Anggaran sebesar Rp854,7 miliar digunakan untuk pengembangan program bandara dan pelabuhan beserta fasilitasnya.

Selain alokasi anggaran, komitmen pemerintah agar industri pariwisata dapat melesat juga terlihat dari beberapa kebijakan salah satunya adalah

Besarnya alokasi anggaran dan masifnya pengembangan kawasan wisata memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memegang komitmen menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi

pembentukan Kelompok Kerja Pariwisata di Komite Industri Nasional Indonesia. Ada tiga tugas yang diamanatkan kepada Pokja Pariwisata Nasional yakni membangun peta jalan industri pariwisata Indonesia, membuat memo kebijakan, dan memberikan edukasi.

“Jadi sebetulnya Pokja Pariwisata di Komite Industri Nasional Indonesia itu tugasnya adalah membangun *roadmap*. Kemudian, *output* lainnya adalah membuat memo kebijakan Presiden yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata ke depan. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi pariwisata,” terang Donny Oskaria, Ketua Pokja Pariwisata Nasional KEIN.

Tidak hanya Pokja Pariwisata Nasional, pemerintah juga membentuk Badan Pelaksana Otoritas untuk pengembangan kawasan Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo. Badan Otoritas Pariwisata ini ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di destinasi wisata agar kunjungan wisman ke Indonesia meningkat. Badan ini berwenang dalam menjaga atraksi alam budaya dan buatan, membangun akses infrastruktur dasar dan mengembangkan amenitas.

Besarnya alokasi anggaran dan pengembangan kawasan wisata yang masif memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memegang komitmen untuk menggenjot arus wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Sinergi adalah kunci

Pada APBN 2020, alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pariwisata di Indonesia tersebar di beberapa kementerian antara lain Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemepar dan Ekraf, KLHK, Kemen ESDM, Kemendes PDT dan Kemendikbud. Tidak hanya itu, pengembangan pariwisata juga dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik yang diberikan pemerintah pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan menuturkan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak bisa diklaim hanya dari alokasi DAK. Menurutnya, transfer DAK, alokasi anggaran di beberapa K/L, dan kontribusi pemimpin daerah adalah faktor pendukung pengembangan pariwisata. Jadi, sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci unggulnya industri pariwisata Indonesia.

Perspektif serupa dikatakan Moekti. Menurutnya,

sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan dalam mengembangkan destinasi wisata.

“Destinasi wisata itu tanggung jawab Pemda makanya Pemda juga perlu menyiapkan dari anggaran mereka. Selain infrastruktur fisik, Pemda juga perlu melatih masyarakat untuk bisa menyambut wisman atau dilatih memiliki *skill* khusus disesuaikan dengan wisata alamnya seperti sertifikat khusus mendaki gunung atau *rafting*. Nah, untuk pemerintah pusat perannya bisa dibilang sebagai koordinator. Soalnya daerah wisata itu bisa jadi ada di perbatasan beberapa kabupaten,” ujar Moekti.

Sementara itu, Chusmeru, Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman menyatakan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menghindari tumpang tindih aturan dan konflik dalam mengembangkan pariwisata di daerah.

Beragam tantangan di lapangan

Menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan. Berbagai tantangan harus dihadapi mulai dari sisi perencanaan, alokasi anggaran maupun implementasi kegiatan di lapangan.

Dalam penyaluran DAK pariwisata, Putut menyatakan tantangannya ada di fase perencanaan. Pemenuhan kualitas perencanaan dan juga kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola DAK.

“Biasanya kan ini berbasis usulan, misal ada beberapa daerah yang menjadi prioritas untuk mengembangkan wisata. Akan tetapi, daerah tersebut tidak mengusulkan jadi ya kita tidak bisa

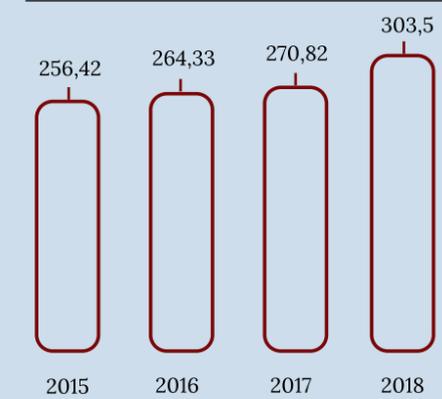
mengalokasikan. Jika kemudian daerah prioritas dan mengusulkan tetap saja ada kendala. Terkadang usulannya kurang berkualitas. Aktivitas-aktivitas yang dipilih ternyata tidak esensial mendorong pertumbuhan wisatanya. Lalu, ada juga masalah SDM di daerah yang kurang bisa mengeksekusi DAK baik fisik maupun non fisik dengan baik. Artinya, kualitas perencanaan di daerah itu juga menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya. Sementara itu, menurut Made ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di Indonesia terutama dari sisi penganggaran. *Pertama*, pembangunan pariwisata membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN atau APBD. BUMN dan swasta perlu dilibatkan dalam pembangunan ini. *Kedua*, alokasi anggaran tersebar di beberapa kementerian. Untuk itu perlu sinkronisasi dan koordinasi yang intens agar pembangunan pariwisata mangkus dan sangkil. *Ketiga*, masih belum selesainya konsep *integrated tourism master plan* sebagai pedoman nasional pengembangan pariwisata secara terintegrasi berkelanjutan. *Keempat*, belum adanya pedoman bagi K/L untuk melakukan apa yang dibutuhkan dalam kawasan wisata prioritas. *Kelima*, masih ada kendala dalam pembebasan tanah dan ganti rugi serta masih adanya konflik sosial.

Masalah pembebasan lahan juga dirasakan oleh KemenPUPR sebagai salah satu tantangan yang mereka hadapi di lapangan saat mengerjakan pembangunan infrastruktur. Selain itu, kebutuhan infrastruktur yang besar untuk lima destinasi wisata prioritas juga menjadi tantangan lain yang harus diselesaikan.

Kontribusi Pariwisata Bagi PDB Nasional (%)



Jumlah Kunjungan Wisatawan (Juta Orang)



Wisatawan Nusantara



Wisatawan Mancanegara



Mengejar Kemerdekaan Belajar

Foto Resha Aditya P Teks Dimach Putra

Satu dekade telah berlalu sejak amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang prioritas anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak dana telah digelontorkan dan berhasil menciptakan peningkatan di sektor pendidikan nasional. Namun seperti halnya koin yang memiliki dua sisi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Semuanya dikerjakan untuk mengejar kemerdekaan belajar demi lahirnya generasi penerus sumber daya manusia (SDM) Indonesia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Lalu apa saja tantangannya?

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 (dan amandemen) menjamin hak tiap warga negara untuk mendapat akses pendidikan. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan lebih jauh diatur dalam ayat ke-4 yang mengharuskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Sejak diamanatkan satu dasawarsa silam dalam amandemen UUD 1945, akumulasi porsi anggaran di bidang pendidikan yang tak pernah kurang dari 20 persen itu telah menyentuh angka Rp4.000 triliun. Alokasi untuk anggaran pendidikan saat ini bertenger di urutan teratas sebagai belanja negara paling besar dalam APBN. Untuk tahun 2019, total anggaran di sektor tersebut mencapai Rp508,1 triliun. Setiap tahun alokasinya memiliki tren yang terus meningkat. Dalam RAPBN 2020 angkanya naik menjadi Rp505,8 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan dengan nilai yang besar tersebut memang tidak langsung dikucurkan ke kementerian/ lembaga terkait (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Sekitar 60 persen akan disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) nonfisik ke daerah. Penggunaan DAK nonfisik diantaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tunjangan profesi guru.

Desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran pendidikan, merupakan gagasan yang ditawarkan Kemenkeu dalam pengelolaan

anggaran pendidikan. Dengan skema tersebut, Menkeu menitikpkan harapan agar pengelolaan anggaran pendidikan bisa lebih dioptimalkan lagi. Pada salah satu acara dalam rangkaian Konferensi Pendidikan Indonesia (30/11) yang dihadapinya, Menkeu berpesan tentang pentingnya langkah nyata dalam penggunaan anggaran pendidikan agar berkontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Akses kunci sukses

Kunta Wibawa, Direktur PAPBN Direktorat Jenderal Anggaran menuturkan bahwa porsi anggaran pendidikan utamanya akan digunakan untuk mendukung fokus pemerintah dalam membuka luas akses pendidikan. Sebuah pekerjaan rumah yang paling berat memang untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata, mengingat tantangan kondisi geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Harapannya, tak ada lagi warga negara yang terhalang kesempatannya mendapat layanan dari fasilitas pendidikan. "Makanya lebih pada upaya untuk menambah fasilitas sekolah yang terjangkau. Sekolahnya gratis. Lalu, orang mau datang ke sana (untuk belajar)," jelas Kunta.

Kesuksesan program pembangunan akses pendidikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diukur dengan menggunakan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Menurut rilis resmi Kemendikbud 2018/2019 capaian APK Indonesia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing 103,54 persen, 100,8 persen, dan 88,55 persen. Sementara untuk capaian APM, masing-masing sebesar 91,96 persen, 75,64 persen, dan 67,29 persen.

Capaian APK dan APM Indonesia tersebut cukup mengecewakan, karena menunjukkan penurunan persentase di tiap kenaikan jenjang pendidikan. Meski belum menggembirakan, berdasarkan data bank dunia, rasio APK dasar dan menengah Indonesia setara dengan kebanyakan negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dengan fokus pemerintah yang ingin segera menghadirkan layanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indoensia, *gap* tersebut akan segera tertutup.

Memantaskan kualitas pendidikan

Memasuki dekade baru, pada 2020 ini pemerintah akan mengerucutkan konsentrasi pengembangan pendidikan dengan menitikberatkan ke akselerasi kualitas. Tentu, itu sejalan dengan rencana besar nasional, menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan SDM yang berdaya saing tinggi. Harapannya, tak hanya unggul secara nasional tapi juga mendunia.

Berbicara tentang peningkatan kualitas, pasti erat kaitannya dengan tiga unsur utama yang diperhatikan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tiga unsur tersebut meliputi guru, murid dan kurikulum. Untuk itu, dalam anggaran pendidikan juga dialokasikan dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemberian fasilitas bagi murid untuk mengakses pengetahuan, dan penyusunan kurikulum yang tepat sesuai kebutuhan.

Agar anggaran tersebut dapat diukur dengan baik efektifitas penggunaannya, Pemerintah pun selalu melakukan pengawasan ketat. Salah satu metode evaluasinya disebut *public expenditure review*. "Kita lihat, evaluasi, dan diskusikan dengan Bappenas, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, termasuk Ditjen Perimbangan Keuangan. Kita membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan seperti apa," jelas Kunta Wibawa.

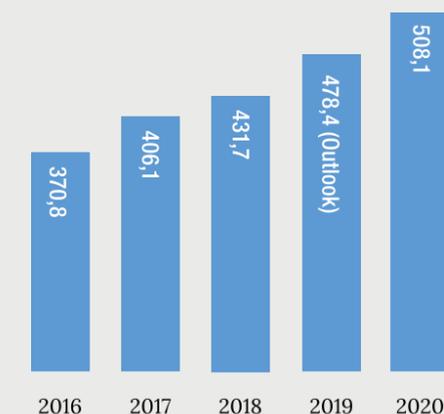
Beragam tantangan di lapangan

Praktisi sekaligus pengamat pendidikan, Najelaa Shihab, cukup mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, utamanya dalam mendorong akses pendidikan. Najeela melihat pemerintah telah cukup memberi perhatiannya pada masalah ketimpangan kesempatan pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang kurang beruntung, baik dari segi geografis maupun status ekonomi dan sosial. "Wilayah 3T semakin diperhatikan, dan Kartu Indonesia Pintar juga menjadi salah satu solusi untuk membantu anak Indonesia tetap bersekolah. Selain itu, kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas juga diharapkan meningkat dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi," terangnya.

Namun memang harus diakui masalah yang ada di lapangan tidak semudah apa yang tersaji dalam data. Bagaimanapun tiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Masalah-masalah kecil dalam pelaksanaan pendidikan di tiap daerah akan menggelinding seperti bola salju jika tidak diperhatikan dan ditemukan solusinya. Nani Rahakbaw, Kepala SMP Negeri 1 Tual, menyampaikan komentarnya terkait biaya operasional sekolah di tempatnya memimpin. Ia menggambarkan dengan kebutuhan biaya fotokopi untuk bahan ujian tengah semester (UTS). "Fotokopi di Tual per lembar 500 rupiah," ia melanjutkan, "Saat UTS fotokopinya bisa jutaan. Kalau di Jawa seribu rupiah bisa dapat banyak, di sini baru dapat dua lembar."

Frederik S, Kepala SD Negeri Inpres 68 Sorong, menceritakan bagaimana sekolah yang dipimpinnya menjadi terfavorit di Sorong. Hal itu tentu saja membuat wali murid berbondong-

Anggaran Pendidikan dalam APBN (Triliun Rupiah)



Rincian Pos Anggaran Pendidikan

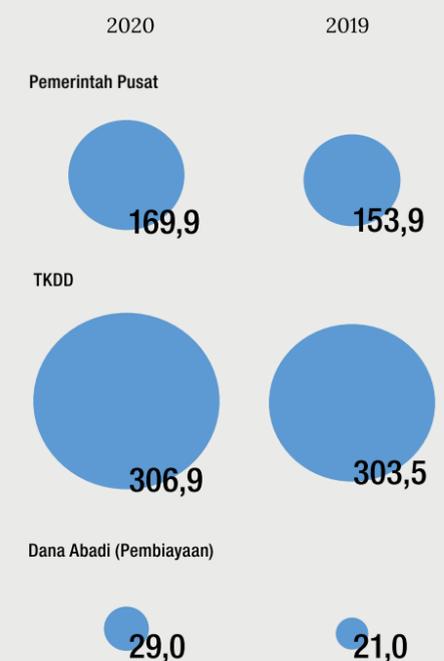




Foto
Resha Aditya P

bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah bergengsi tersebut. Tapi sayang, kebijakan terbaru mengharuskan sekolah menerapkan sistem zonasi. “Ada yang dari gunung, semua ingin mendaftar ke sini karena ingin anaknya dapat pendidikan terbaik,” ujarnya. Untuk itu, ia menitip harapan agar kebijakan tertentu tidak harus diterapkan secara nasional. “Harus dilihat keadaan di lapangan, karena kondisi tiap daerah itu bisa jadi berbeda,” jelas Frederik.

Meski ada kendala di beberapa sisi, ada hal lain yang sangat mereka apresiasi. Salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP). Nani merasa program ini sangat membantu. “Dulu sebelum PIP, siswa

bukan malas sekolah. Dia malu, mungkin sepatunya rusak, bajunya sudah kuning”, katanya. Ia melanjutkan, dengan adanya PIP, siswa yang sempat enggan ke sekolah jadi lebih bersemangat. “Bisa beli buku, pakai pakaian yang layak itu bisa memberikan semangat buat dia,” ujarnya. Tak berhenti di situ, Nani juga merasakan dampak PIP berdampak pada efektivitas kegiatan belajar mengajar dari sisi guru. Menurutnya, para guru di sekolahnya jadi lebih mudah dalam menyampaikan pelajaran karena siswa telah terfasilitasi. Perbaikan ini tentu sebuah kabar baik bagi Indonesia yang sedang fokus membangun generasi masa depannya.

Angin perubahan pembelajaran

Sejak Oktober lalu, Nadiem Anwar Makarim telah menjadi buah bibir. Kali ini bukan lagi tentang gebrakannya memimpin perusahaan *unicorn* di bidang transportasi *online*. Tapi karena ia terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di periode awal kepemimpinannya ini ia tidak ingin banyak mengumbar janji.

Ia memilih untuk lebih banyak mendengar dan mempelajari. Mendengar dari para staf di Kemendikbud. Berdiskusi dengan para pakar pendidikan yang datang dengan berlapis gagasan. Serta berkoordinasi dengan institusi pemerintahan lain, termasuk Kementerian Keuangan.

Baru-baru ini Nadiem menjadi tajuk utama berbagai media massa. Nadiem menawarkan empat pokok kebijakan baru yang diberi nama Merdeka Belajar yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia. Empat poin utama dalam kebijakan tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Saat kebijakan baru tersebut diterapkan nantinya akan ada perubahan mekanisme pelaksanaan keempat pokok di atas.

Dalam pelaksanaan USBN, pada 2020 akan dimulai penerapan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut nantinya digunakan untuk menilai kompetensi masing-masing siswa. Bentuk penilaiannya dikembalikan sesuai kebijakan tiap sekolah, bisa berupa tes tertulis atau penilaian komprehensif lainnya. “Guru dan sekolah lebih merdeka menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dapat dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” jelas Mendikbud.

Sementara itu, arah kebijakan UN akan dimulai di tahun 2021. UN 2020 merupakan pelaksanaan terakhir tes nasional tersebut. Penggantinya, akan diselenggarakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan di tengah jenjang sekolah. Tujuannya adalah *feedback* agar sekolah tahu sektor apa saja yang harus dibenahi. Selain itu, siswa dapat meningkatkan prestasi atau memperbaiki kekurangannya di sisa masa studinya.

Sedangkan untuk penyusunan RPP, Kemdikbud berencana akan memangkas beberapa komponen. Nantinya, para guru diberi kebebasan memilih, membuat,

menggunakan dan mengembangkan format RPP. Satu yang pasti, RPP tersebut memuat tiga komponen berupa tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Terakhir terkait PPDB, Kemendikbud akan menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sisa 30 persen diberikan untuk jalur prestasi atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pijar merdeka belajar

Komitmen pemerintah dalam menjamin amanat undang-undang tentang penyelenggaraan pendidikan tidak perlu diragukan. Ada halangan bukan berarti menghambat jalan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan di seluruh penjuru nusantara. Tiap hal yang dihadapi dalam prosesnya menjadi pembelajaran untuk terus berbenah.

Tahun 2045 memang masih terasa jauh di depan. Tapi jika terlena, kita tak akan mampu meraihnya. Untuk itu kita harus terus mengejar visi Indonesia Emas yang telah dicanangkan. Mengutip pernyataan Nadiem saat menutup pidatonya pada Hari Guru Nasional, “Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak.”

Masih menurut Nadiem, merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir yang dimulai dari guru. Tanpa terjadi esensi kemerdekaan tersebut di level guru tak akan dapat ditularkan ke murid. Dalam esensi kemerdekaan tersebut, tentu saja bukan hanya guru yang bergerak. Tapi dari guru sebagai pemberi layanan langsung kepada siswa, hingga pemerintah pusat harus mampu bergerak serentak. Agar merdeka belajar dapat tercapai di Indonesia. Agar dari kemerdekaan tersebut dapat lahir SDM Indonesia yang lebih matang dan berkualitas.

Menkeu berpesan tentang pentingnya langkah nyata dalam penggunaan anggaran pendidikan agar berkontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.



Siasat Dana Siaga Bencana

Foto Resha Aditya P Teks A. Wirananda

Konon, bagi korban bencana, sekuat-kuat upaya yang dapat dilakukan selain bertahan adalah merapal doa. Kepada mereka, negara mesti hadir untuk menjahit kembali harapan yang koyak diterpa nasib. Negara mesti menjadi peluk bagi tubuh yang kehilangan dekap, menjadi kehangatan bagi tubuh-tubuh yang menggigil di tenda pengungsian, pun menjadi nafkah bagi anak-anak yang menahan lapar sepanjang malam. Tak cukup di situ, negara juga mesti hadir merancang dan membangun kembali kedamaian di lokasi bencana. Untuk dapat maksimal menjalankan masing-masing peran, pemerintah terus membenahi pola dan siasat untuk mendanai penanggulangan bencana.

"Soal penganggaran pembangunan kembali pasca bencana bukan sekedar masalah birokrasi jumlah anggaran dan penyaluran. Tetapi mesti berangkat dari konsepsi".

Kuntoro Mangkusubroto
Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2009

Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilareral (PKRB) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan, sampai dengan 2018, pemerintah menyiapkan dana kisaran lima triliun rupiah setiap tahun untuk penanganan bencana. "Dana tanggap darurat istilahnya. Besarnya itu rata-rata itu turun naiklah, tapi kalau yang terakhir ini ya diatas 5 T (triliun), rata-rata selama 15 tahun," ungkapnya. Irfa mengatakan dana ini diproyeksikan untuk dapat meredam dampak dari bencana yang melanda Indonesia. "Nah jadi itu sebenarnya adalah *shockbreaker* lah gitu ya kalau terjadi bencana besar," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Dr Widjo Kongko dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana seyogyanya dipersiapkan secara komprehensif. Bukan hanya dana tanggap darurat, melainkan juga untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi. "Bahwa bukan anggaran tanggap darurat saja, bukan rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi) saja, tetapi anggaran mitigasi yang juga harus disiapkan," ungkapnya. Ia melanjutkan, "Yang penting terkait dengan anggaran kebencanaan itu harus detil, arsitektur kebencanaan itu anggarannya harus melibatkan keseluruhan proses mulai dari mitigasi, proses rehab rekon, tanggap darurat termasuk kesiapsiagaan."

Dana sejumlah itu tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan untuk penanganan bencana. Saat bencana besar terjadi beruntun, dana itu tentu tidak mencukupi. Tak menutup kemungkinan, kebutuhan dana untuk penanganan bencana membengkak dua sampai tiga kali lipat. Irfa mencontohkan situasi pada 2018 silam, kala Indonesia didera setidaknya dua kali gempa besar. "Nah tapi kalau bencana besar seperti terjadi di Lombok sama yang kemarin di Sulawesi Tengah, nah itu dana itu tidak cukup, ya kan. Nah contohnya yang Lombok saja itu perkiraannya itu sekitar 5 T, dananya. Nah kemudian yang Sulawesi Tengah itu *double* sampai 10 T," ungkapnya.

Untuk meniyasati situasi-situasi tak terduga semacam itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyusun mekanisme baru di tahun 2019 dan tahun-tahun setelahnya. Irfa mengatakan, mulai tahun 2019, Kemenkeu mulai meniyasati alokasi anggaran bencana dengan dua hal, yakni asuransi barang milik negara dan pembentukan *pooling fund*. "Jadi kalau terjadi bencana, katakan gedung ini hancur ya, itu nanti yang bayar asuransi," ia melanjutkan, "kita juga mau mempercepat pembentukan *pooling fund*. Nah *pooling fund* adalah tadi, jadi



Foto
Resha Aditya P

pooling fund ini harapannya adalah semua jenis pembiayaan itu bisa dilakukan oleh lembaga ini."

Hal serupa juga dikatakan oleh Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur PAPBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. "Intinya ke depannya kita juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita bisa mengatasi bencana tadi dengan lebih teroganisir dan teratur tapi bebannya tidak juga semuanya ke APBN," katanya dalam kesempatan terpisah.

Ihwal asuransi, Dr. Widjo Kongko, Ahli Tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan

Teknologi (BPPT) sependapat dengan pemerintah. "Asuransi penting terutama untuk menghitung risiko. Risiko harus bisa dihitung dan diklarifikasikan menjadi biaya yang harus ditanggung oleh pihak ketiga, dalam hal ini asuransi," katanya.

Peta zonasi untuk mitigasi

Selain ihwal penyiapan dana untuk bencana, pemerintah juga mesti memikirkan lebih jauh mengenai siasat menghadapi ancaman bencana dengan lebih matang. Widjo Kongko berpendapat pemerintah perlu menyusun skala prioritas terkait penganggaran untuk penanganan bencana. "Ini Indonesia kan luas," ia melanjutkan, "Maka yang harus dilakukan adalah skala prioritas. Nah kalau skala prioritas itu berarti kita melihat kajian-kajian yang sudah cukup lengkap untuk menjadi prioritas ke

depan terkait dengan program mitigasi bencana, dan itu sudah ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait dengan prioritas dalam dokumen *master plan* penanganan risiko bencana.”

Hal senada dikatakan juga oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2009. Selain penentuan skala prioritas, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memiliki peta zonasi bencana. Peta zonasi itu bukan semata memuat zona rawan bencana, melainkan juga menjadi dasar untuk penentuan pihak mana yang mesti menanggung beban tatkala terjadi bencana. Menurutnya, peta zonasi ini yang nantinya harus disosialisasikan kepada masyarakat. “Jadi masyarakat diajari bahwa *you* kalau masuk ke merah is *your own risk*. But if you go to orange and kuning, then we share risk. If it’s hijau, dan rontok, it’s the insurance cover risk. Jadi bagi-bagi semuanya,” katanya mengilustrasikan.

Peta zonasi yang mesti dipersiapkan ini tidak hanya memuat bencana berupa gempa dan tsunami saja. Namun memuat pula risiko bencana lain, seperti banjir atau tanah longsor. Menurutnya, pemetaan zonasi bencana ini bagian yang esensial dalam menentukan kebijakan setelahnya. Dengan adanya peta zonasi yang jelas, pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut, kebijakan penanggung biaya tatkala terjadi bencana, pun bagaimana mekanisme pembiayaannya.

Kuntoro juga memaparkan pentingnya peta zonasi bencana ini untuk kebijakan pendanaan di masa mendatang. “Soal penganggaran pembangunan kembali pasca bencana bukan sekedar masalah birokrasi jumlah anggaran dan penyaluran. Tetapi mesti berangkat dari konsepsi,” ia melanjutkan, “Tapi kalau pakai cara seperti ini (peta zonasi) *you minimize*. Karena ada lembaga lain (asuransi) yang bantu *you*.” Ia juga mengatakan bahwa organisasi yang menangani bencana tidak seyogyanya bersifat birokratis. “Organisasi bencana alam tidak bisa birokratis. Tidak bisa. Karena sifat dari bencana alam berbeda- beda antara satu dan yang lainnya,” ungkapnya.

Ihwal peta zonasi, Widjo Kongko mengatakan saat ini pihaknya telah mempersiapkan peta zonasi bencana. “BNPB sudah membuat peta rawan bencana. Tentu peta yang dibuat oleh BNPB dalam skala yang mungkin belum terlalu detail. Itu dipakai sebagai *baseline* atau modal awal untuk melakukan kajian yang lebih lanjut dan dan memperkirakan anggaran dan skala prioritas sesuai dengan risiko dan seterusnya,” ungkap Widjo Kongko. Kendati belum sempurna, ia mengatakan peta zonasi ini masih dapat terus

Konsep Peta Zonasi Versi Kuntoro

TINGKAT KERAWANAN	PIHAK PENANGGUNG
Sangat Tinggi	Ditanggung Sendiri
Tinggi	Ditanggung Bersama
Sedang	Ditanggung Bersama
Rendah	Ditanggung Asuransi

Proporsi Anggaran Bencana Versi Widjo Kongko



Konsep Sumber Pendanaan Bencana



dimutakhirkan. “Menurut saya itu harus diskusi bareng-bareng dan harusnya arahnya ke sana (peta yang lebih komprehensif) secara umum,” katanya menambahkan.

Ketersediaan dan proporsi

Berbekal kajian di berbagai sektor, serta pengalaman diterpa bencana, pemerintah mulai mengasuransi barang milik negara. Dengan mekanisme asuransi, diharapkan biaya yang muncul akibat bencana tak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, mekanisme asuransi diharapkan dapat mempersingkat waktu pembangunan kembali pasca bencana. Irfa Ampri mengatakan bahwa telah ada kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Anggaran bahwa klaim dari asuransi akan bisa langsung digunakan tanpa menunggu penganggaran tahun berikutnya. “Jadi begitu diterima klaim asuransi kalau terjadi bencana dananya bisa langsung dipakai untuk membangun segera,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan nantinya perlu melakukan perubahan kebijakan di sektor lain, misalnya pengadaan saat bencana. “Misalnya ya *gimana* untuk membuat pengadaan yang cepat *gitu* kan, jadi lelangnya juga harus cepat, kita bisa belajar dengan negara lain,” ia melanjutkan, “Meksiko misalnya, dia sudah punya kontraktor yang sudah masuk ke dalam *list gitu*, ini kontraktor yang betul-betul *capable*.” Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme ini akan berjalan baik tatkala diiringi dengan keberadaan *pooling fund* atau kumpulan dana.

“Contoh, di Meksiko, mereka sudah punya itu *pooling fund* itu sudah bisa untuk segera menugaskan kontraktor yang berada di wilayah (yang terjadi bencana) tadi,” ungkapnya memaparkan.

Ihwal keberadaan kumpulan dana atau *pooling fund*, tahun ini pemerintah telah mulai membangun. Dana yang pertama dimasukkan ke *pooling fund*, kata Irfa, berasal dari APBN. “Tahun ini sudah dialokasikan ya 1 triliun,” katanya. Ke depan, dana yang saat ini dialokasikan untuk tanggap darurat, dapat mulai dialokasikan sebagian ke *pooling fund*. Pun apabila dana yang sudah dianggarkan tidak terpakai karena tidak terjadi bencana, dapat langsung dimasukkan ke *pooling fund* juga.

Selain dana yang harus selalu siaga, Widjo Kongko menekankan anggaran kebencanaan harus memuat seluruh proses penanganan bencana. “Anggarannya harus melibatkan keseluruhan proses mulai dari mitigasi, proses *rehab recon*, tanggap darurat, termasuk kesiapsiagaan. Jadi kita melihatnya sebagai perencanaan anggaran yang keseluruhan. Yang komprehensif,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya pembagian proporsi dalam anggaran kebencanaan itu. “Keberimbangan antara mitigasi dengan tanggap darurat dan rehab recon harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu banyak di rehab recon, sementara di mitigasi dikurangi,” katanya.

"Keberimbangan antara mitigasi dengan tanggap darurat dan rehab recon harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu banyak di rehab rekon, sementara di mitigasi dikurangi".

Dr. Widjo Kongko
Ahli Tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)



Riset Negeri untuk Daya Saing Tinggi

Foto Resha Aditya P Teks Farida Rosadi

Kemajuan peradaban suatu negeri, tak lepas dari kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dimiliki. Perkembangan IPTEK kuasa menghadirkan beragam inovasi baru dengan tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi. Inovasi tak hanya jadi solusi bagi sejumlah persoalan negeri, tetapi juga melambungkan daya saing, di era kompetisi tinggi. Akankah kucuran dana abadi riset, pembentukan badan riset berskala nasional, hingga ragam upaya membangun ekosistem yang ramah bagi kegiatan riset, mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaya saing tinggi?

Indonesia tengah menyambut momentum menuju negara berpenghasilan tinggi. PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam salah satu publikasinya menyebutkan, posisi perekonomian Indonesia pada 2030 mendatang, diprediksi menempati peringkat kelima di dunia dengan estimasi nilai PDB mencapai USD5.424 miliar. Selanjutnya pada 2050, perekonomian Indonesia juga diprediksikan naik peringkat ke posisi empat dengan nilai GDP USD10.502 miliar.

Meski demikian, berkaca pada kondisi sekarang, Indonesia perlu bekerja lebih keras lagi untuk merealisasikan prediksi PwC tersebut. Menteri Riset dan Teknologi, Bambang P.S Brodjonegoro menyebutkan, sudah sepuluh tahun terakhir, Indonesia masih belum beranjak dari posisi negara dengan pendapatan menengah. Saat ini, tingkat pendapatan per kapita Indonesia diketahui masih sebesar USD3.900. “Indonesia mestinya segera naik, setidaknya masih dalam negara dengan pendapatan menengah, namun pada level atas, atau kira-kira USD9.000,” sebutnya.

Lebih jauh, Bambang P.S Brodjonegoro menjelaskan, untuk menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi, perlu dilakukan transformasi pembangunan ekonomi ke arah *Innovation Driven Economy*. “Dalam pembangunan ekonomi yang berbasis inovasi, peran sumber daya manusia dan teknologi sangatlah penting karena menjadi faktor yang dapat mendorong produktivitas tinggi dan meningkatkan nilai tambah produk,” jelas Bambang.

Sementara saat ini, Indonesia masih berada pada fase ke dua dari tingkat pembangunan ekonomi, yaitu *Investment Driven Economy*. “Pada posisi ini”, sebut Bambang, “Indonesia masih menitikberatkan pada investasi infrastruktur dan pengembangan manufaktur dengan adopsi teknologi dari luar negeri.”

Hal ini nampaknya sejalan dengan *Global Competitiveness Index 2018-2019* yang baru-baru saja dirilis World Economic Forum (WEF) beberapa waktu lalu. Rilis tersebut menempatkan daya saing Indonesia di posisi ke-50 dengan nilai 65 dari skala 100. WEF menggunakan 12 pilar dalam melakukan penilaian. Salah satu pilarnya ialah inovasi.

Menurut WEF, inovasi Indonesia dinilai masih cukup rendah, berada di posisi ke-74 dengan nilai 38. Dalam pilar inovasi ini, publikasi Indonesia berada di urutan ke-56, paten di urutan ke-101, serta belanja riset dan pengembangan (*R&D expenditures*) terhadap persentase PDB berada di urutan ke-116 dari 174 negara. Berkaca pada hasil rilis ini, sudah saatnya bagi Indonesia untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi kegiatan riset agar muncul beragam inovasi yang mampu meningkatkan daya saing negeri.

Suburkan ekosistem riset negeri

Kesempatan untuk menumbuhkan ekosistem yang

"Dalam pembangunan ekonomi yang berbasis inovasi, peran sumber daya manusia dan teknologi sangatlah penting karena menjadi faktor yang dapat mendorong produktivitas tinggi dan meningkatkan nilai tambah produk"

Bambang P.S Brodjonegoro
Menteri Riset dan
Teknolog



Foto
Resha Aditya P

ramah bagi kegiatan riset disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada visi riset nasional tahun 2017-2045 yang mencanangkan terwujudnya Indonesia yang berdaya saing dan berdaulat dengan berbasis pada IPTEK. Hal ini pun sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, pemerintah mencanangkan pembangunan SDM unggul dan Indonesia maju dengan penguasaan iptek dan inovasi sebagai landasannya.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti Muhammad Dimiyati mengungkapkan, itu sebabnya pemerintah menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) periode 2017-2045. RIRN disusun untuk mendorong kemajuan IPTEK, serta meningkatkan kontribusi riset bagi perekonomian nasional.

“(RIRN) diharapkan akan menjadi panduan bagi para peneliti dan seluruh komunitas peneliti di negara ini untuk menuju pada

tahapan-tahapan tertentu pada waktu tertentu mengenai (arah) riset itu akan dibawa ke mana. jelasnya.”

Lebih jauh Dimiyati melanjutkan, RIRN mengatur secara rinci bidang fokus riset maupun prioritas riset ke depan. Selanjutnya, prioritas riset nasional akan dirumuskan setiap lima tahunan sekali. “Untuk mencapai ini semua, kita perlu berbagai instrumen, regulasi, termasuk anggarannya. Ini yang sedang menjadi topik

pembahasan pemerintah saat ini (bersama DPR). Dari berbagai instrumen itu, nanti akan kita dorong, termasuk reformasi kelembagaannya, sehingga bisa fokus dan sangat *valid*,” katanya menjelaskan.

Terdapat beberapa target indikator yang ingin diraih Indonesia melalui penyusunan dan implementasi RIRN 2017-2045. Pertama, dari sisi rasio anggaran riset. Kontribusi swasta terhadap belanja riset diharapkan bisa mendekati 75 persen, sedangkan kontribusi pemerintah baik pusat dan daerah diharapkan berada di kisaran 25 persen. Saat ini diketahui, sebanyak 86 persen belanja riset masih didominasi oleh pemerintah. Sementara sisanya sebesar 14 persen berasal dari swasta dan universitas. Tidak hanya itu, RIRN juga menargetkan total belanja riset Indonesia bisa mencapai 1,68 persen dari PDB pada 2025 mendatang, naik dibandingkan belanja saat ini yang hanya sebesar 0,25 persen dari PDB.

Kedua, dari sisi SDM. RIRN mematok target rasio kandidat SDM IPTEK terhadap jumlah penduduk Indonesia. Pada 2025 diharapkan terdapat 3.200 orang per 1 juta penduduk, serta 8.600 orang per 1 juta penduduk pada 2045. RIRN menyebutkan, kecukupan jumlah SDM ini perlu dipenuhi agar kontribusi riset bisa berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, mereka berpotensi menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK di masa depan. Ketiga, terkait produktivitas periset. Pada 2025 pemerintah menargetkan dari setiap 100 periset, terdapat sedikitnya 8 publikasi internasional bereputasi, serta 22 publikasi internasional bereputasi per 100 periset pada 2045.

Untuk mencapai itu semua, pemerintah perlu membangun ekosistem yang ramah bagi kegiatan riset. Selain terkait kelembagaan riset, pemerintah menjalankan sejumlah strategi guna menumbuhkan kegiatan riset. Mulai dari peningkatan kerjasama riset dengan

industri, pemberlakuan pengurangan pajak hingga tiga kali lipat bagi perusahaan yang bersedia mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan riset (*triple tax deduction*), serta pemberian insentif bagi industri yang melakukan hilirisasi produk-produk hasil riset. Selain itu, guna memunculkan tunas periset baru, pemerintah mendorong peneliti muda di bangku sekolah untuk terlibat dalam banyak kegiatan penelitian. Dimyati juga menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan program sertifikasi bagi masyarakat peneliti, yang bukan dari lembaga penelitian, untuk dapat disetarakan.

Dana abadi untuk kegiatan riset

Sejumlah strategi yang hendak dilakukan guna membangun ekosistem yang ramah bagi kegiatan riset tidak lepas dari kebutuhan anggaran. Sebagaimana diketahui, saat ini, anggaran riset Indonesia (*Gross of Expenditure on Research and Development*, GERD) baru mencapai 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah terus mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan anggaran riset menuju jumlah idealnya. Salah satunya melalui dana abadi riset.

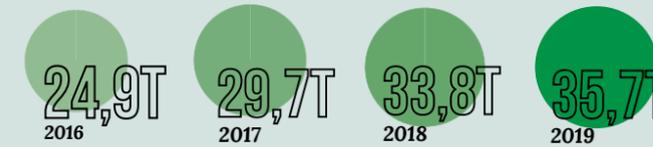
“Ide dana abadi riset bahwa di dalam anggaran pendidikan kita sebesar 20 persen dari APBN, perlu adanya pemihakan kepada penelitian. Jadi mulai tahun 2019 dialokasikan (dana abadi riset) sekitar Rp1 triliun,” ungkap Menkeu. Dana abadi riset ini menjadi salah satu terobosan pemerintah guna mengatasi keterbatasan anggaran riset.

Di luar dana abadi riset, pemerintah pada 2019 telah mengalokasikan anggaran penelitian sebesar Rp35,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp33,8 triliun pada 2018 dan sebesar Rp24,9 triliun pada 2016. Selanjutnya pada 2020, pemerintah kembali mengaloaksikan dana abadi riset. Kali ini, besarnya hingga lima kali lipat dana abadi riset tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp5 triliun. Dengan demikian, total dana abadi riset Indonesia saat ini nyaris mencapai Rp6 triliun.

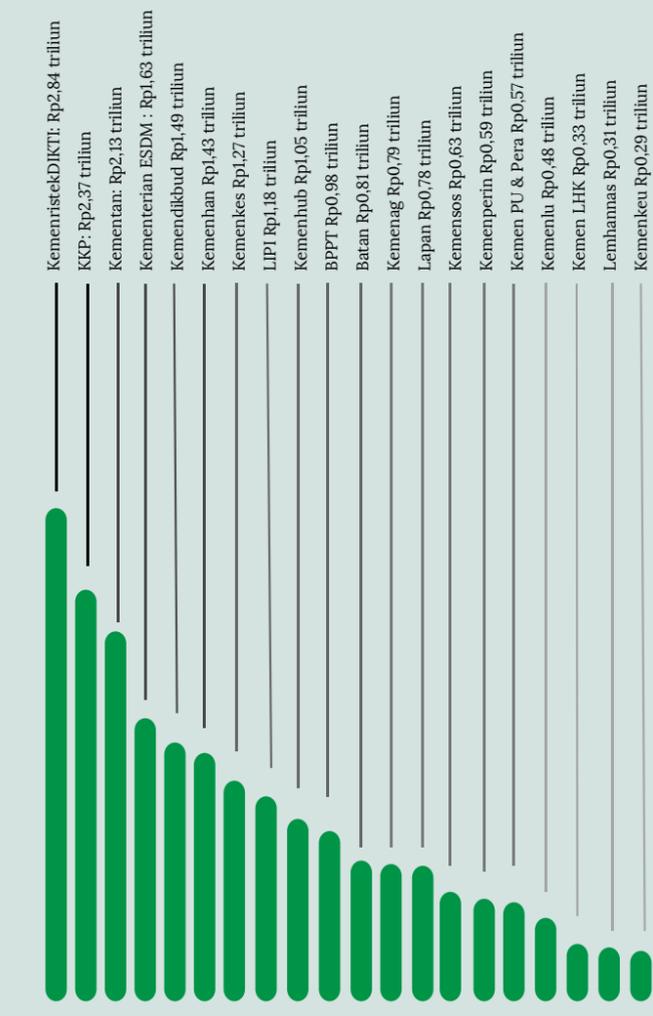
Menristek Bambang Brodjonegoro menyampaikan, nantinya penggunaan dana abadi tersebut ditujukan terutama untuk kegiatan riset dan inovasi yang mendukung tiga hal. Pertama, peningkatan pada nilai tambah sumber daya alam. Kedua, peningkatan substitusi impor dengan produk sama, tapi bernilai tambah atau berharga lebih murah dan mudah didapat. Ketiga, berguna bagi kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM dengan teknologi yang tepat guna.

Sementara itu, dia menyebutkan, dana abadi riset ditujukan kepada peneliti, perekayasa, atau inovator yang diharapkan menghasilkan produk yang memberikan nilai dan dampak yang besar untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan

Alokasi Anggaran Riset di Indonesia dari tahun ke tahun



Sebaran alokasi belanja Litbang (GBAORD) Kementerian dan LPNK (Top 20) tahun 2016



ekonomi. “Serta penggunaannya akan melewati sistem seleksi yang sangat ketat sehingga benar-benar menghasilkan program yang tepat dan baik,” katanya.

Kuatkan koordinasi lembaga riset

Sebagaimana diketahui, pengelolaan anggaran riset (selain dana abadi riset) selama ini tersebar di 52 kementerian dan Lembaga (K/L). Dari total 52 K/L tersebut, sebanyak tujuh lembaga dedikatif untuk riset (BPPT, LIPI, Bapeten, LAPAN), sedangkan 45 lainnya merupakan kementerian yang memiliki kegiatan penelitian dan pengembangan.

Itu sebabnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati begitu menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran riset secara optimal. Jika (dana riset) dikelola oleh K/L yang *mindset*-nya hanya birokratis dan bukan dalam rangka menyelesaikan masalah atau meng-*adress* suatu isu, maka anggaran (riset) yang besar tidak mencerminkan kemampuan dan kualitas untuk bisa menghasilkan riset,” sebutnya.

Sehubungan dengan itu Dimyati menyebutkan, dari sekian banyak institusi yang melakukan riset, tidak jarang riset yang dihasilkan saling bertumpang tindih. “(Bahkan), kadang-kadang riset itu betul-betul *copy paste* dengan riset yang diadakan di litbang K/L. Jadi tidak satu *framework*,” ungkapnya.

Itu sebabnya, pemerintah membangun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Badan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Fungsi utama BRIN ialah untuk mengintegrasikan segala kegiatan riset, mulai dari perencanaan, program, anggaran, serta sumber daya secara terpadu. Dengan demikian, segala kegiatan riset baik yang ada di perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan baik pusat maupun daerah, serta di sejumlah kementerian, tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa tujuan.

“Hal terpenting adalah menghindarkan dari berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan riset, serta menghindarkan inefisiensi penggunaan sumber daya, khususnya anggaran yang relatif masih kecil, namun difokuskan pada kegiatan riset yang dapat memberikan nilai dan dampak yang luas bagi masyarakat bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,” jelas Menristek.

Nantinya segala program dan anggaran riset sepenuhnya berada di bawah pengawasan BRIN. “Meski demikian, lembaga-lembaga (riset) yang saat ini ada, diharapkan masih tetap eksis. Namun dengan penyesuaian organisasi yang sejalan dengan tugas-tugas yang akan diberikan setelah dikoordinasikan oleh BRIN”, harapnya.



Di Balik Rasio Pajak

Yustinus Prastowo,
Praktisi Perpajakan



dealnya, tumbuhnya perekonomian suatu negara berjalan seiring dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Namun di Indonesia, hal ini tak terjadi. Perekonomian Indonesia (2009-2018) tumbuh positif, tetapi realisasi pajak (2009-2018) tak pernah mencapai target. Pada 2019, selama Bulan Januari-Oktober, kita baru mengumpulkan Rp1018,47 triliun atau 70,8 persen dari target APBN. Capaian ini patut diwaspadai karena pertumbuhan pajak periode ini kurang menggembirakan. Selama periode tersebut, pajak hanya tumbuh 0,19 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (2017) yang tumbuh hingga 15,9 persen.

Penerimaan pajak yang rendah ini tentu berpengaruh terhadap rasio pajak. Sejak Orde Baru, terutama mulai 2005, terjadi lonjakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan di mana PDB Indonesia yang hanya Rp2.729,7 triliun mengalami pertumbuhan hingga 450 persen menjadi Rp14.837,4 di tahun 2018.

Artinya, kue ekonomi kita mengalami

peningkatan rata-rata 35 persen setiap tahunnya, sebagian besar ditopang lonjakan harga komoditas.

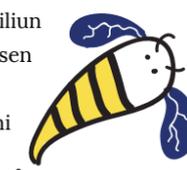
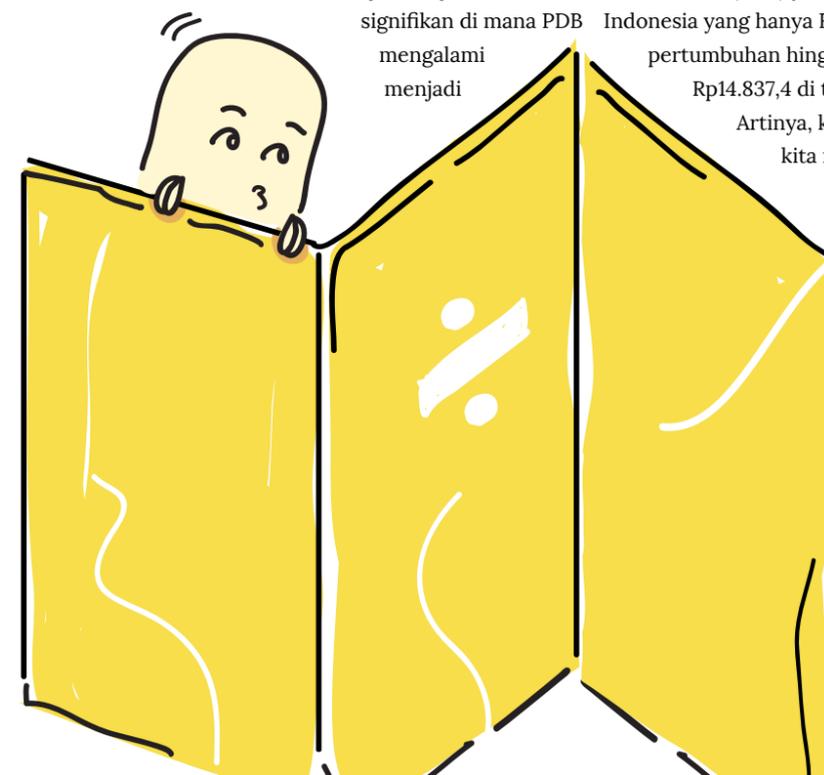
Dalam publikasi OECD bertajuk *Revenue in Asian and Pacific Economies 2019* disebutkan, rasio pajak Indonesia adalah yang terendah dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Data yang digunakan oleh OECD adalah data tahun 2017 (kecuali Afrika dan Jepang yang menggunakan data tahun 2016). Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia menunjukkan tren menurun sejak 2012.

Puncaknya terjadi di tahun 2017, ketika rasio pajak Indonesia menyentuh angka 10,58 persen dari 13,95 persen di tahun 2012.

Kondisi Indonesia di mana perekonomian Indonesia tumbuh positif meski rasio pajak rendah dan kinerja pemungutan pajak stagnan bisa dibilang anomali. Hal ini menunjukkan rasio pajak tak bisa diisolasi menjadi sekadar masalah perbandingan.

Menurut Edmund Husserl, seorang filsuf Austria sekaligus ahli matematika, salah satu kesesatan terbesar sains modern sejak Galileo adalah menganggap

Ilustrasi
A. Wirananda



Dapatkan kemudahan layanan informasi publik dengan

m-PPID

Teman Transparansimu

Unduh Sekarang di  dan segera di Appstore





nyata apa yang sesungguhnya hanyalah metode. Refleksi Husserl itu dapat dijadikan ilham untuk melihat rasio pajak lebih dalam. Di balik rasio pajak, terdapat berbagai soal yang tak serta-merta kelihatan dalam angka. Itulah mengapa rasio pajak bukanlah satu-satunya alat untuk mengukur kinerja perpajakan, meski secara indikatif berguna untuk mengenali gejala inefektivitas pemungutan pajak sejak dini.

Ada empat faktor yang dapat menjelaskan sebab PDB Indonesia tidak berkorelasi positif dengan kinerja perpajakan, khususnya rasio pajak.

Pertama, tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Program amnesti pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan nampaknya baru membantu menambah basis pajak baru dan belum meningkatkan rasio pajak. Meski tingkat kepatuhan pajak terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 60 persen menjadi 71,1 persen di tahun 2018, namun angka tersebut masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kepatuhan tersebut pun masih terbatas pada kepatuhan yang sifatnya formal yakni menyampaikan SPT dan belum mempertimbangkan kepatuhan material yang melibatkan kebenaran isi SPT.

Kedua, tingginya *hard-to-tax sector*, khususnya usaha rintisan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor pertanian/perkebunan/perikanan yang berkontribusi cukup besar terhadap PDB. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, komposisi UMKM mencapai 59,2 juta unit dari total 60,01 juta unit usaha di Indonesia. Di satu

sisi, UMKM menjadi penyumbang PDB terbesar namun di sisi lain kepatuhan dan literasi yang masih sangat rendah menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memungut pajak. Dalam konteks itu, kebijakan penurunan tarif pajak UMKM sudah tepat dan layak diapresiasi, demi memperluas basis pajak dari sektor ini. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mewajibkan para pelaku usaha *online* untuk memiliki izin usaha, harus dapat dimanfaatkan untuk mulai membangun basis data yang akurat dari sektor ini.

Ketiga, pesatnya perkembangan ekonomi digital tidak diiringi dengan modernisasi perangkat teknologi informasi perpajakan, SDM yang mumpuni, serta regulasi. Akibatnya, potensi pajak sektor ini menjadi sulit ditangkap. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Pada 2016, tercatat nilai transaksi dari sektor ekonomi digital sebesar USD5,6 miliar. Dalam konteks ini, kebijakan pajak *e-commerce* sudah tepat demi menjamin keadilan dalam pengenaan pajak. Namun demikian, disharmoni antar-regulasi seperti penurunan tarif pajak UMKM di satu pihak dan kewajiban pelaku usaha *online* untuk memiliki izin usaha di lain pihak selalu perlu diantisipasi.

Keempat, maraknya praktik penghindaran pajak. Data-data dari *tax amnesty*, *Swiss Leaks*, *Panama Papers*, *Paradise Papers*, dan sebagainya mencerminkan banyaknya warga negara Indonesia yang berupaya menghindari

pajak. Program *tax amnesty* pun menjadi solusi tepat di tengah kondisi tersebut. Tidak hanya meningkatkan kepatuhan, program ini juga menjadi momentum yang baik untuk mulai membangun *tax culture* yang sehat. Selanjutnya *tax amnesty* harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas.

Kendati rasio pajak bukan satu-satunya alat untuk mengukur kinerja perpajakan, mendongkrak rasio pajak tetaplah salah satu tugas penting negara. Tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata hanya dapat dicapai dengan level penerimaan pajak yang optimal yang dapat mengakselerasi pembangunan.

Searah dengan itu, upaya-upaya pemerintah dari sisi regulasi untuk mendongkrak rasio pajak perlu terus didukung: *reinventing policy*, kenaikan PTKP, *tax amnesty*, konfirmasi status WP, UU AEOI, Pembaruan Sistem Informasi, pemeriksaan pajak, percepatan restitusi, penurunan tarif WP UMKM, dan CRS AEOI. Semua itu tak lain adalah upaya meningkatkan rasio pajak dan basis pajak, juga secara serentak mendorong kepatuhan.

Ibarat cermin, rasio pajak dapat dijadikan salah satu sarana untuk berkaca, tanpa kita harus menganggap bayangan cermin itu sebagai kenyataan sesungguhnya. Perbaikan selayaknya diarahkan pada kenyataan, bukan bayangannya. Kita sudah berada di jalur yang tepat, jangan sampai kereta perubahan ini berjalan terlampaui lambat!



Tumbuh dalam Tekanan

Hidayat Amir

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang perekonomiannya masih bisa tumbuh relatif tinggi di tahun 2019. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal ketiga 2019, tatkala negara-negara lain di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tiongkok yang pada tahun lalu masih tumbuh 6,6 persen, pada 2019 ini mengalami penurunan. Pada kuartal ketiga 2019, Tiongkok hanya tumbuh 6,0 persen. Perlambatan juga terjadi di India, salah satu negara sumber pertumbuhan baru. Tahun lalu, India mampu tumbuh 6,8 persen. Tahun ini terus melorot bahkan di kuartal ketiga 2019 hanya mampu tumbuh 4,5 persen. Beberapa negara di dunia bahkan telah mengalami resesi atau tumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Tahun 2019 memang bukan tahun yang mudah bagi perekonomian dunia.

Berbagai tekanan dan gejolak yang terjadi membuat ekonomi dunia mengalami perlambatan yang cukup dalam, bahkan menjadi yang terburuk sejak krisis keuangan global pada 2009. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,6 persen di 2018 menjadi 3,0 persen untuk tahun ini. Pertumbuhan volume perdagangan bahkan diperkirakan hanya tumbuh 1,1 persen di 2019, atau turun signifikan jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,6 persen.



Ilustrasi
Dimach Putra



Kinerja perdagangan yang begitu merosot memang menjadi salah satu sumber risiko terbesar bagi ekonomi dunia. Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, telah menciptakan ketidakpastian yang tinggi dan menambah tekanan untuk permintaan global. Rendahnya tingkat permintaan global dan tingginya tensi dagang membuat aktivitas manufaktur berkontraksi di banyak negara serta menekan harga komoditas. Hal-hal tersebut memberi ancaman pada pertumbuhan investasi dan produktivitas secara global, dua faktor yang sangat esensial dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat dunia.

Sementara itu, kondisi politik yang memanas di banyak negara turut menambah deretan tantangan perekonomian global. Hong Kong menjadi contoh negara yang tengah menghadapi gejolak politik sangat tinggi, sehingga aktivitas ekonominya terganggu dan berada di jurang resesi. Gelombang protes juga terjadi di berbagai kawasan seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa, sehingga menambah ketidakpastian pada kondisi global.

Situasi ekonomi global yang tidak menguntungkan tersebut, tentu memiliki imbas pada Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia selama ini mengambil manfaat dari aktivitas perdagangan dan investasi internasional. Maka, gejolak global yang terjadi memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, setidaknya melalui dua transmisi tersebut. Pada sisi perdagangan, kinerja ekspor dan impor Indonesia selama 2019 mengalami tekanan, seiring dengan lemahnya permintaan global, termasuk mitra dagang utama seperti Tiongkok. Perang dagang semakin memukul ekonomi Tiongkok yang sudah berada dalam tren moderasi sejak negara tersebut melakukan pergeseran model pertumbuhan (*rebalancing economic growth*) dari *investment-led* menjadi

consumption-led.

Pada sisi investasi, aliran modal masuk ke Indonesia pada 2019 masih sangat baik dan menunjukkan peningkatan. Investasi langsung Indonesia secara kumulatif hingga triwulan ketiga 2019 tumbuh solid 12,3 persen (ytd), ditopang Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah kembali pada tren pertumbuhan positif. Ini merupakan sinyal baik bagi peningkatan produktivitas ekonomi ke depan. Aliran investasi portofolio juga tercatat masih sangat baik. Hal ini menunjukkan kesehatan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia menjadi faktor yang menarik minat investor. Namun, kewaspadaan perlu terus dijaga, utamanya terhadap sentimen negatif dari ketidakpastian global yang dapat dengan mudah mempengaruhi kepercayaan investor.

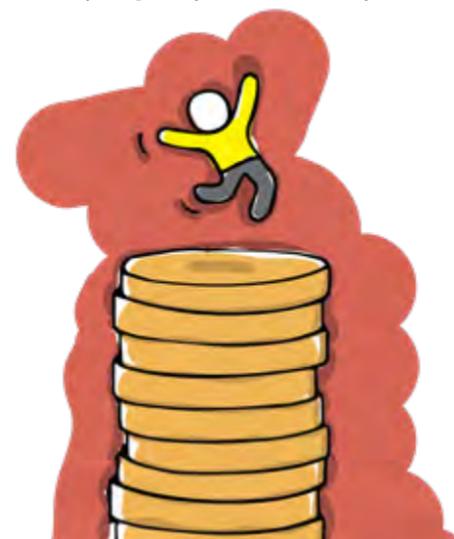
Bagi Indonesia, perdagangan internasional terutama ekspor dan investasi, merupakan dua mesin yang perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat terus meningkat guna mendukung target pembangunan. Daya saing ekspor dan investasi merupakan penopang bagi produktivitas dan jalan untuk pertumbuhan yang lebih berkualitas. Pertumbuhan yang akan menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Tentunya dengan tetap menjaga daya beli untuk konsumsi yang saat ini menjadi komponen terbesar penyumbang ekonomi.

Namun, perlu disadari bahwa pekerjaan rumah Indonesia untuk mendorong daya saing ekspor dan investasi masih berhadapan dengan banyak tantangan. Berdasarkan penilaian *Global Competitiveness Index*, daya saing Indonesia terhambat oleh faktor-faktor struktural seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, institusi, serta sistem keuangan. Kemudahan berusaha di Indonesia juga dianggap masih kalah dibanding banyak negara. Dalam dua tahun terakhir, peringkat kemudahan berusaha bahkan stagnan di posisi 73. Padahal periode 2015–2017, Indonesia mampu

mengakselerasi peringkat kemudahan berusaha secara signifikan yang ditopang oleh berbagai reformasi struktural seperti reformasi subsidi energi, akselerasi infrastruktur, dan perbaikan iklim investasi. Pada periode tersebut, peringkat kemudahan Indonesia secara total melesat dari 120 menjadi 72.

Stagnannya peringkat kemudahan berusaha dalam dua tahun terakhir menggarisbawahi pentingnya Indonesia mengencarkan kembali reformasi, serta perlunya implementasi reformasi yang lebih kuat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya reformasi pada area-area yang krusial seperti sumber daya manusia (SDM). Dimensi dari reformasi SDM mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kecakapan dalam mengadopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

Indonesia perlu bersyukur. Tahun 2019 kita lalui dengan sangat baik. Apalagi mengingat kita telah berhasil menjalankan hajatan demokrasi, serta pemilu presiden dan parlemen secara bersamaan untuk pertama kalinya. Semua dijalankan dalam dinamika yang sehat untuk memperbarui konsensus bersama membangun Indonesia. Kini saatnya, menengok kembali berbagai agenda reformasi agar kembali ke jalur percepatannya. Reformasi struktural yang berorientasi kepada kualitas SDM guna meningkatkan produktivitas menjadi cerita nyata. Regulasi yang lebih simpel dan kondusif, birokrasi yang efisien dan melayani, adalah bagian penting agar Indonesia siap memasuki era *knowledge economy*. Siap menjadi Indonesia maju!



Awas, jangan tertipu oleh mereka.

- Tidak pernah ada Down Payment atau DP untuk pembelian objek lelang;
- Uang jaminan lelang selalu disetorkan ke rekening bendahara, bukan atas nama pribadi;
- Apabila menemukan selebaran atau penawaran melalui telepon yang mencurigakan, silakan hubungi contact center kami.

SEJARAH TAK BERSUDUT DI

Villa Isola

Teks dan foto Anggara Pradnya W.

Terletak di titik paling terkemuka di jalan antara Bandung dan Lembang, Villa Isola menyihir para pecinta arsitektur. Nuansa *art deco*-nya tak dapat ditemukan di tempat lain. Cerita pembangunannya penuh intrik. Filosofinya jawara soal kesepian dan kesendirian yang menyimpan kekuatan.

Gedung yang kini menjadi rektorat Universitas Pendidikan Indonesia ini dibangun pada 1933. Rancang bangunnya dinahkodai oleh arsitek termashyur di Bandung, C.P. Wolff Schoemaker, yang juga merancang Masjid Cipaganti (1933) dan Bank Mandiri Jakarta Kota (1940). Pemilik gedung ini adalah seorang taipan pemilik Kantor Berita ANETA, Dominic Willem Beretty, sinyo Yogyakarta yang bergaya hidup eksentrik. Kantor Berita ANETA sendiri adalah yang pertama di Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, ia diubah menjadi Kantor Berita Domei.

Villa Isola dikenal sebagai mahakarya terakhir C.P. Wolff Schoemaker. Kenampakannya mendobrak gaya arsitektur yang umum dianut para arsitek Hindia Belanda kala itu. Begitu selesai, gedung ini langsung menjadi ikon *art deco* Kota Bandung di akhir 1930-an. Saking fantastisnya, satu penulis menerangkan bahwa gedung ini memiliki langgam yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dimiliki sebuah gedung.

Simetri gedung langsung menjadi fitur utama yang tampak ketika seseorang melihat Villa Isola. Tidak ada teras depan maupun belakang yang biasanya menjadi ciri bangunan kolonial; Villa Isola malah menjulang ke angkasa dengan lengkung-lengkungnya yang futuristik, tapi eksentrik. Dahulu, pekarangan Villa Isola sangat luas, mencapai 120.000 m², sehingga menurut satu sumber, jalan dari Bandung ke Lembang harus dibelokkan mengelilinginya.

Villa Isola adalah sebuah bangunan yang penuh dengan gosip, bahkan sejak belum selesai. Ada gosip bahwa fondasinya begitu kuat sehingga artileri dapat dipasang di atap untuk menyerang Bandung. Biaya pembangunannya pun disebut-sebut mencapai setengah juta gulden. Jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran wilayah koloni pada masa itu.

Pemiliknya, Dominic Willem Beretty, juga tak luput dari gosip. Ia tidak seberapa lama menikmati bangunan



ini karena ia meninggal ketika Natal 1934 akibat kecelakaan pesawat di dekat Baghdad setelah pesawatnya terjebak badai pasir hebat dan jatuh. Desas-desus beredar, dari bahwa Beretty adalah agen rahasia Jepang sampai ke gosip bahwa ia dibunuh oleh sang gubernur jenderal karena bermain mata dengan putrinya.

Kita patut berbangga karena pada hari ini Villa Isola yang kaya sejarah masih berdiri sebagai milik kita, meski dengan beberapa perubahan seperti penambahan satu lantai paling atas dan pernak-pernik lain yang tidak perlu. Kegajilan bangunan ini masih bertahan; keunikannya membuat bangunan ini tidak ada duanya. Rasa-rasanya,

Villa Isola adalah tujuan wajib wisatawan ke Bandung; tak lengkap bicara sejarah Bandung jika tak mampir di Villa Isola.

Terakhir, Villa Isola tidak dinamakan demikian tanpa alasan. Beretty, si pemilik, meskipun dikenal sebagai raja gosip di Hindia Belanda, dikenal pula sebagai seorang yang suka menyendiri, akibat seringnya dirinya diterpa isu miring. Sang arsitek dengan tepat menangkap maksud itu; ia membuat satu motto yang terpampang di bagian dalam gedung ini: *M'isolo e vivo*, aku mengisolasi diriku dan kehidupan.

Tapi bagi saya, kalimat itu punya arti baru: *aku sendirian dan aku berjaya*.

Aakhir-akhir ini hujan mulai rajin menyapa. Meskipun datang di tempat yang sama, hujan disambut dengan respons beraneka. Ada ojek payung yang senang, lalu bergegas memantau gerak calon pelanggan. Ada yang tak acuh dan tetap fokus pada pekerjaan. Ada pula yang menggerutu karena jemuran miliknya belum kering dan perlu segera diamankan. Pun ada pula yang termenung karena dijejali setumpuk kerinduan.

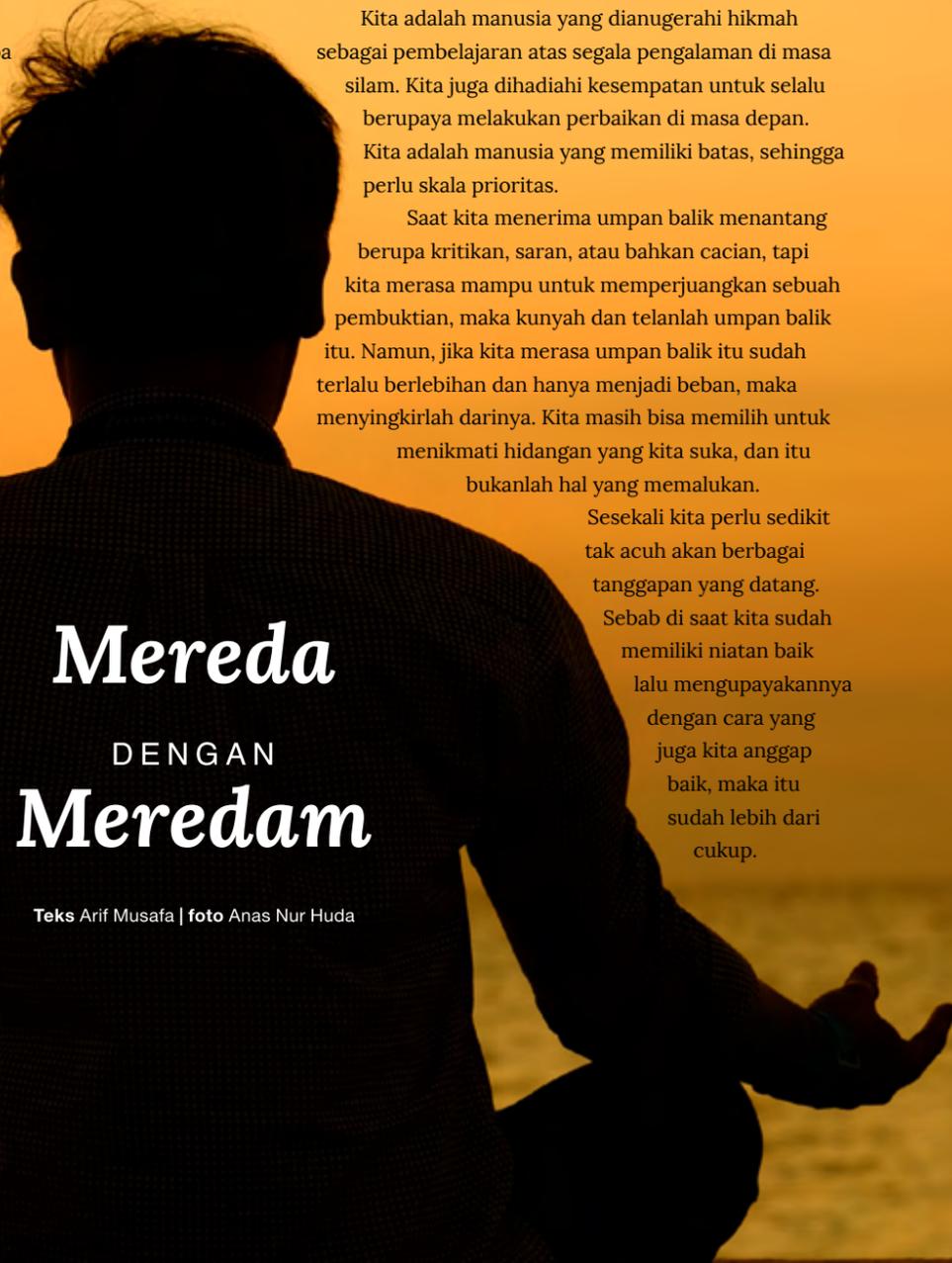
Seperti hujan, dalam bermasyarakat atau berinteraksi di lingkungan kerja, kehadiran dan laku kita seringkali beroleh tanggapan yang beragam. Ada yang mengapresiasi, ada yang tak peduli, pun bisa juga ada yang mencaci. Itu baru setingkat kita. Bagaimana pula dengan laku para pengambil kebijakan di negeri ini? Tiap gerak-gerik mereka tak jarang diikuti sejumlah pro dan kontra. "Bapak sungguh merakyat dan tahu betul yang terbaik buat rakyatnya," aku segilintir masyarakat. "Rakyat sudah susah, Pak, jangan dibikin tambah susah," komentar segelintir yang lain.

Respons yang beragam memang tak dapat kita hindari, baik dalam bentuk gestur, ucapan, hingga tindakan. Bagi

respons bernada positif boleh jadi berpengaruh baik pada diri. Namun yang bernada negatif, tak jarang memenuhi pikiran, lalu mengerdilkan semangat.

Bila lebih jernih melihat, respons negatif seseorang terhadap kita bisa disebabkan berbagai hal. Sebagian memang beralasan, tapi tak jarang, sebagian lain semata karena faktor emosional. Respons bernada negatif dari orang di sekitar kita, jika bernilai relevan dan masuk akal, sejatinya baik sebagai bekal perbaikan. Namun, jika respons negatif berlandaskan masalah personal, "Aku benci kamu. Titik."

Maka apa pun yang kita



Mereda DENGAN Meredam

Teks Arif Musafa | foto Anas Nur Huda

lakukan, boleh jadi selalu tampak salah, atau dicari-cari celah kelemahannya untuk dijatuhkan.

Maka barangkali, kita bisa belajar dari hujan. Meski pada saat turun, ia selalu disambut dengan berbagai tanggapan, tapi siklusnya tetap menakjubkan. Ia kumpulan air permukaan yang berasal dari berbagai tempat dengan beragam keadaan, lalu berproses. Pada fase selanjutnya, saat jatuh ke bumi, hadirnya hujan memberi kesejukan, meresap ke tanah, dan menebarkan aroma *petrichor* yang menenteramkan.

Itu sebabnya, kita perlu meredam emosi guna berdamai dengan keadaan. Pada setiap interaksi kita dengan banyak orang, beragam tanggapan tak akan mampu kita hindari. Maka perlu kita ingat, memenuhi seluruh harap bukanlah tanggung jawab. Kita juga bukan cenayang yang bisa tahu segala isi hati orang.

Kita adalah manusia yang dianugerahi hikmah sebagai pembelajaran atas segala pengalaman di masa silam. Kita juga dihadiah kesempatan untuk selalu berupaya melakukan perbaikan di masa depan. Kita adalah manusia yang memiliki batas, sehingga perlu skala prioritas.

Saat kita menerima umpan balik menantang berupa kritikan, saran, atau bahkan cacian, tapi kita merasa mampu untuk memperjuangkan sebuah pembuktian, maka kunyah dan telanlah umpan balik itu. Namun, jika kita merasa umpan balik itu sudah terlalu berlebihan dan hanya menjadi beban, maka menyingkirlah darinya. Kita masih bisa memilih untuk menikmati hidangan yang kita suka, dan itu bukanlah hal yang memalukan.

Sesekali kita perlu sedikit tak acuh akan berbagai tanggapan yang datang.

Sebab di saat kita sudah memiliki niat baik lalu mengupayakannya dengan cara yang juga kita anggap baik, maka itu sudah lebih dari cukup.

Mas Praim

"RESOLUSI BARU (?)"

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska





HARI BRAILLE SEDUNIA
4 JANUARI 2020

Foto
Arief K.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA